

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROPINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat taufik dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dibukukan sebagaimana yang tersaji.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 memuat rencana program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD - Revisi) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara disusun sebagai suatu dokumen bahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal dalam mendukung serta mendorong visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara serta visi dan misi Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, Juni 2023



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara

DR. Marwan Polisiri, SKM., MPH

Pembina Utama Muda. IV/c

Nip.19801115 200501 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	 9
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2020-2024	 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	43
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	50
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	56
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
 BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	 82
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	82
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	75
3.3 Program dan kegiatan (Matriks)	88
 BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	 97
 BAB V Penutup	 104

Lampiran :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di tahun anggaran 2024, program pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memasuki Tahun ke 5 (Lima) dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 atau Fase terakhir dari RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun visi Gubernur Maluku Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD - Revisi) 2020 – 2024 yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

” Maluku Utara Sejahtera ”

Akronim terhadap kata *” Sejahtera ”* itu sendiri adalah *Sehat dan cErdas* *berbudaya; MaJu; Agamis dan Harmonis, Tumbuh Ekonominya; serta Reformis dan Adil*. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah merumuskan 5 (lima) langkah / Misi pembangunan yaitu :

1. Membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
3. Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan;
5. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai target-target dalam sasaran strategis pembangunan secara efektif sebagaimana termaknai dalam visi dan misi pembangunan, maka RPJMD Provisi Maluku Utara telah menetapkan 6 (enam) prioritas daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Pemerataan infrasturktur dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi;

4. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
5. Peningkatan harmoni social dan kondusifitas wilayah; dan
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan.

Dalam menindaklanjuti tujuan dan sasaran strategis RPJMD 2020-2024 tersebut maka diperlukan sebuah Rencana Kerja tahunan Dinas sebagai sebuah dokumen yang menggambarkan sasaran dan tujuan OPD dalam satu Tahun Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran itu disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Rencana Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebuah rencana kerja berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan yang tergambar jelas dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tersebut, serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja RI 2020 – 2024 nomor 8 Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024 nomor 17 Tahun 2020.

Untuk menjaga kesinambungan program kerja Dinas Nakertrans, Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan mencermati keberhasilan Tahun 2021 dan 2022. Selain itu perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada Tahun 2024 juga mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang ditemui di Tahun 2021 dan 2022 serta pula memperhatikan pencapaian tema RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yaitu “Mewujudkan Penciptaan Daya Saing Dan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan”

Dalam kaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, indikator yang menjadi tujuan prioritas kerja yang ingin dicapai adalah 1) Persentase Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi; 2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta / Orang); 3) Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan; 4) Persentase sengketa Hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%); dan 5) Persentase Penegakan K3 oleh Perusahaan terdaftar dalam WLKP Online; 6) Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 7) Jumlah kawasan Transmigrasi yang dibangun; 8) Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan.

Strategi untuk mewujudkan tercapainya indikator program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dapat dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu *S – O (Strengths – Opportunity)* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
19. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,
24. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara.
29. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

I.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Dihasilkannya suatu dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal, perencanaan arah kebijakan, perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- Dirumuskannya pedoman perencanaan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal bagi seluruh

pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara bertujuan sebagai berikut :

- Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2020/2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 dengan melihat kondisi pembangunan nasional dan regional;
- Mengarahkan visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024;
- Menyusun kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal yang dituangkan dalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2024 dengan keterkaitan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan;
- Menyusun kaidah-kaidah pelaksanaan aspek-aspek pembangunan dan penganggaran.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara T.A 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2021,

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 dan 2023 dan Capaian Renstra 2020-2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
- 2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan,

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
- 3.3. Program dan Kegiatan (Matriks)

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V Penutup,

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020-2022 (RENJA TAHUN LALU)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 dan Capaian Terhadap Rencana Strategis 2020-2024

Pelayanan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari tuntutan dan tantangan yang diterjemahkan kedalam visi, misi serta strategi pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal. Keberhasilan pencapaian tersebut akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kesepakatan bersama seluruh pelaku pembangunan.

Pembangunan pada intinya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ditata dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk melihat sejauh mana proses pembangunan tersebut telah dapat menyentuh kepentingan masyarakat serta sasaran strategis Pemerintah Daerah, maka diperlukan Langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya. Hasil dari tahapan evaluasi ini akan sangat membantu dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam visi misi Gubernur akan dapat direalisasikan sebagaimana yang diinginkan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan di tahun sebelumnya dapat dilihat pada table T-C.29 berikut ini ;

RENJA 2024

Tabel. TC,29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	100%							54,00%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%							62,00%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	2	1	1	100	2	5	71%
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1	1	1	100	1	3	60%

RENJA 2024

3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1	1	1	100	1	3	60%
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1	1	1	100	1	3	60%
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1	1	1	100	1	3	60%
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	2	2	2	100	2	6	60%
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	1	1	1	100	1	3	60%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%							60,00%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.580 Orang	1316	1316	1316	100%	1316	3948	60%
2)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dok	1	1	1	100	1	3	60%

RENJA 2024

3)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran yang dilaksanakan	10 Lap	2	2	2	100	2	6	60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%							39%
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia	5 Paket	1	1	1	100	1	3	60%
2)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	1	1	1		1	3	60%
3)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Lap	0	0	0	0	1	1	20%
4)	Pemulangan pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	8 Orang	0	0	0	0	2	2	25%
5)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan dan diikuti	12 Orang	0	1	1	0	2	3	25%

RENJA 2024

	6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3	5	3	0,6	5	11	44%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%							58,00%
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Besaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tagga yang disediakan	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60,00%
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60,00%
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	180 Dok	40	30	30	100%	30	100	55,56%
	6) Penyediaan Bahan Atau Material	Jumlah bahan / material yang tersedia	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%
	7) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	1	1	1	100%	1	3	60%

RENJA 2024

8)	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar dan kedalam daerah yang diikuti	29 Keg	5	5	5	100	5	15	52%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%							63,00%
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	12 Unit	1	2	1	50	7	9	75%
2)	Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang tersedia	14 Unit	1	2	1	50%	7	9	64%
3)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%
4)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%
6)	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor UPTD yang di sewa / dikontrak	14 Paket	2	3	3	100%	3	8	57%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan								60%
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	5 Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	5 Lap	1	1	1	100%	1	3	60%

RENJA 2024

	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 'Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kebersihan kantor, dan makan minum pegawai	5 Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%							36,00%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	6	5	5	100%	5	16	64,00%
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	3	3	6	100%	10	19	38,00%
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	0	0	0	0	7	7	20%
	4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	14 Unit	0	0	0	0	3	3	21%
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	100%							45,00%
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100%							45,00%

RENJA 2024

1)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah	11 Dok (Kab/Kota)	5	2	2	0	1	8	73%
2)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	40 Perusahaan	0	Refocusing	0	0	7	7	18%
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	1,88%							29,00%
Pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi		Presentase pelatihan Tenaga Kerja berdasarkan kluster kompetensi	100%							29,00%
1)	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	3000 Orang	160	650	650	100%	950	1760	58,67%
2)	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	11 Paket	0	0	0	0	5	5	45,45%
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Cakupan pelayanan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	100%							18,75%
1)	Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	64 LPK	0	0	0	0	12	12	18,75%
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Cakupan pelayanan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	100%	-						25,00%

RENJA 2024

	Pelaksanaan Konsultasi 1) Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 perusahaan	0	Refocusing	0	0	5	5	25,00%
	Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Provinsi	Besaran Dokumen Pengukuran Produktivitas Daerah	100%							20%
	1) Pengukuran kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	5 Dok	0	Refocusing	0	0	1	1	20%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	100%							44,00%
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	100%							49,00%
	1) Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	600 Orang	80	Refocusing	0	0	200	280	46,67%
	2) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja dan Calon Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	130 Orang	0	Refocusing	0	0	20	20	15%
	3) Pembinaan Operasionalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	875 Orang	575	135	135	100	0	710	81%

RENJA 2024

	4) Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	755 Orang	50	100	100	100%	250	400	52,98%
	Penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%							50,00%
	1) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 LPTKS	5	0	0	0	5	10	50,00%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	100%							30,00%
	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	1.400 Orang	0	Refocusing	0	0	250	250	17,86%
	2) Pameran Bursa Kerja / Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1.275 Orang	100	Refocusing	200	100%	300	600	42,86%
	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Persentase RPTKA yang disahkan	100%							25%
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA dan Notifikasi yang tidak mengandung perubahan jabatan, Jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	200 Orang	0	0	0	0	50	50	25%
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Propinsi	Persentase penerbitan Dokumen IMTA	100%							65,00%

RENJA 2024

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpajakan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi perpanjangan IMTA yang tersedia	200 Dok	0	0	60	0	70	130	65,00%
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	100%							73,00%
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100%							73,00%
	1) Pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	450 Perusahaan	75	100	100	100%	150	325	72,22%
	2) Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	13 Kasus	1	5	3	60%	5	9	69%
	3) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	450 Perusahaan	50	100	100	100%	100	250	78,13%
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Peraturan Perusahaan (PP)	100%							69%

RENJA 2024

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%							78,00%
	1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	90 Kasus	14	30	32	0	24	70	78%
	2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	75 Perkara	22	20	42	106,67	54	118	157%
	3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	30 Asosiasi	0	0	0	0%	10	10	33%
	4) Pembinaan Pengupahan skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	60 Perusahaan	7	10	10	100%	10	27	45%
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Cakupan Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100%							60%
	1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	5 SK	1	1	1	100,00%	1	3	60%

RENJA 2024

	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	100%							25,00%
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase pelaksanaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	100%							25,00%
	1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	10 Dokumen	2	3	1	33%	2	5	50%
	2) Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Besaran Satuan Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	100%							33,00%
	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penataan persebaran penduduk Transmigrasi lintas daerah dalam 1 Provinsi	100%							33,00%
	1) Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	5 Dok	0	1	1	0	1	2	40%
	2) Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah fasilitasi penataan penduduk yang ditempatkan di lokasi dalam kawasan	150 KK	30	0	0	0	0	30	20,00%
	4) Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	147 KK	-	0	0	0	30	30	20%

RENJA 2024

	6) Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon Transmigran /Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	200 Orang	0	50	50	100%	50	100	50%
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka penanganan daerah tertinggal	100%							19,00%
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	100%							19,00%
	1) Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah SDM yang berkembang di kawasan transmigrasi	135 Orang	0	0	0	0	30	30	22%
	2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah satuan permukiman yang ditingkatkan infrastruktur, sosial, ekonomi dan kelembagaan	24 SP	0	2	1	0	3	4	16,67%

Dari hasil tampilan Tabel T-C29 menunjukkan bahwa secara akumulatif pencapaian realisasi kinerja pada program dan kegiatan dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara menunjukkan hasil yang sangat bervariasi dengan pencapaian Kinerja Program/Kegiatan yang belum optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pencapaian realisasi terhadap target capaian Renstra Dinas 2020-2024 telah mencapai angka 54%. Prosentase ini menunjukkan arah kinerja program yang belum optimal. Kontribusi terbesar pencapaian target bagian Sekretariat Dinas ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan “Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” yaitu sebesar 63%. Selanjutnya Kontribusi terendah disumbangkan oleh kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” yang mencapai nilai sebesar 36. Masih rendahnya pencapaian target sebagaimana terlihat diatas dikarenakan penetapan plafon anggaran pada setiap tahun anggaran tidak sesuai dengan Perencanaan anggaran yang ada, selain itu adanya Refocusing anggaran pada T.A 2020 dan 2021 mengakibatkan beberapa item Kegiatan / Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran.

Pada sektor Ketenagakerjaan terdapat 5 Program kerja yang dilaksanakan. Untuk Program Perencanaan Tenaga Kerja, realisasi capaian kinerja Program berada pada kisaran 45%; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 29%; Program Penempatan Tenaga Kerja 44%; Program Pengawasan Ketenagakerjaan 73%; dan Program Hubungan Industrial sebesar 69%. Pencapaian target pada sector Ketenagakerjaan ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian target pada Bagian Kesekretariatan Dinas. Namun demikian, pada beberapa Program di Sektor Ketenagakerjaan memperlihatkan pencapaian target yang tidak memuaskan seperti pada Program “Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja (29%)”. Masih rendahnya pencapaian target pada Program tersebut dikarenakan pada beberapa Sub Kegiatan seperti “Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja”; “Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan

Menengah”; dan “Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”, proses penganggaran dan pelaksanaannya baru berjalan pada T.A 2022. Hal ini mengakibatkan capaian target pada masing-masing sub kegiatan masih sangat rendah. Berbagai permasalahan ataupun kendala yang terjadi sebagaimana digambarkan diatas lebih disebabkan oleh karena alokasi anggaran yang disediakan kepada Dinas tidak memadai serta adanya refocusing anggaran pada pelaksanaan Tahun Anggaran berjalan sehingga berpengaruh terhadap tingkat pencapaian target.

Tidak berbeda jauh dengan kedua sector/bidang diatas, kondisi yang sama juga terjadi pada sector Ketramigrasian. Terdapat 3 Program Ketramigrasian yang dilaksanakan yaitu Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dimana realisasi capaian target masih berada pada angka 25%; Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi realisasi capaiannya sebesar 33%; dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi besaran realisasi capaiannya sebesar 19%. Masih sangat rendahnya pencaip target pada sector Ketramigrasian ini, penyebabnya kurang lebih sama dengan 2 sektor diatas. Persoalan mendesak yang ada pada sector Ketramigrasian ini sehingga masih sangat rendahnya capai target pada beberapa Sub Kegiatan yaitu alokasi anggaran yang disediakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, sehingga dengan anggaran yang sangat minim tersebut mengakibatkan pelaksanaan berbagai sub kegiatan untuk mendorong keberhasilan Program Ketramigrasian menjadi terhambat.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kondisi masih rendahnya pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Maluku Utara disebabkan oleh beberapa factor yaitu :

- a) Tidak adanya Konsistensi dalam penyusunan program / kegiatan / sub kegiatan pada beberapa bidang Tekhnis ;
- b) Adanya Refocusing / Pemangkasan Anggaran di setiap tahun anggaran berjalan (Tahun 2020, dan 2021);

- c) Minimnya anggaran yang dialokasikan sehingga mengakibatkan alokasi anggaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas menjadi terhambat dan tidak dapat mencapai target yang diharapkan.
- d) Masih rendahnya perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah dalam menangani Pembangunan Sektor Ketrasmigrasian

Berbagai kendala yang tersebut diatas mengakibatkan kinerja dinas menjadi terbatas dan terhambat sehingga berimplikasi terhadap capaian target kinerja sebagaimana yang telah diproyeksikan melalui Renstra 2020-2024. Agar pencapaian target kinerja dinas dapat tercapai disetiap tahun anggaran berjalan diharapkan dalam penyusunan perencanaan kerja tahunan agar lebih memperhatikan konsistensi/keberlanjutan dalam setiap penetapan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan plafon anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas. Demikian pula dalam pelaksanaan refocusing / pemangkasan anggaran, diharapkan agar tidak terlalu besar sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

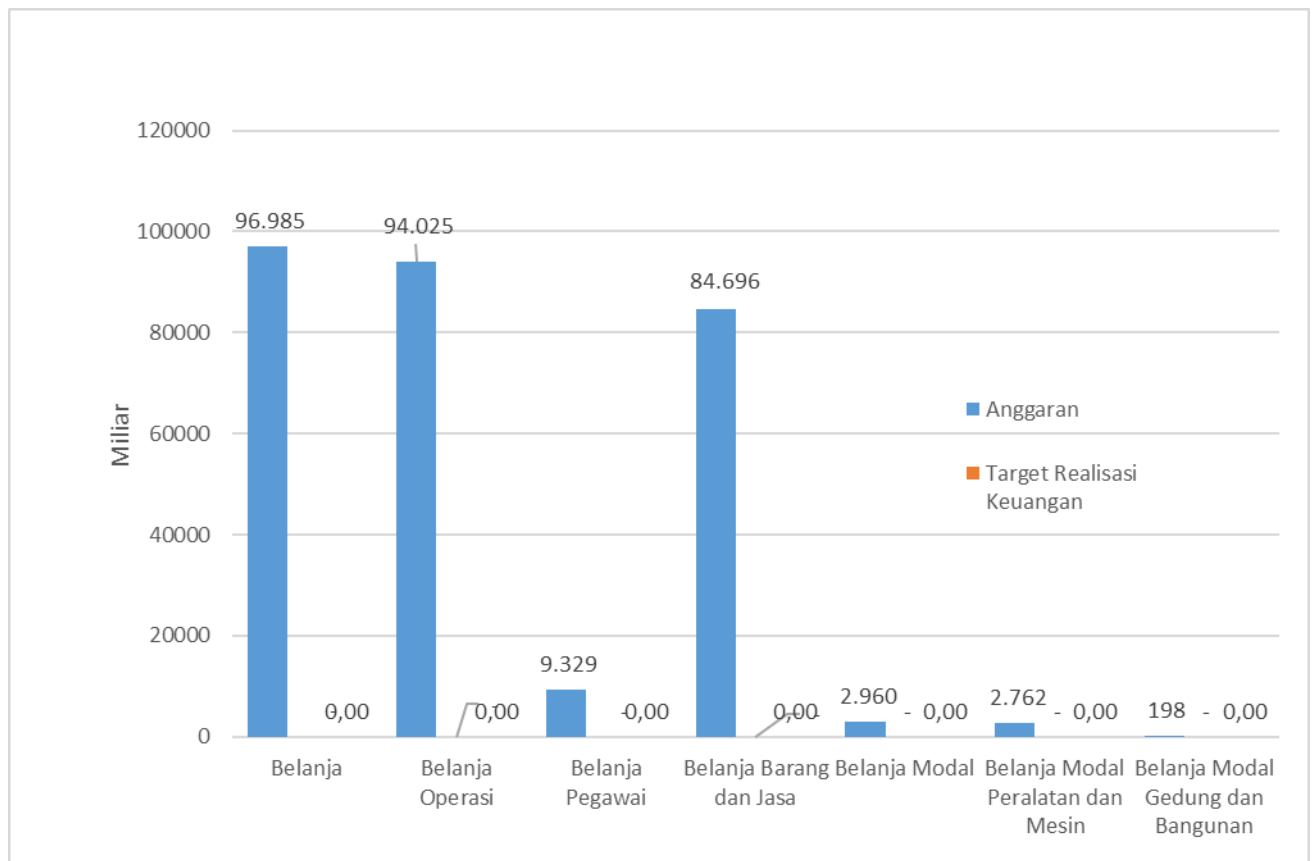
2.1.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 Terhadap Capaian Rencana Strategis 2020-2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana berikut :

Tabel 1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Target Capaian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Target Realisasi Keuangan	Target Capaian Kinerja
I	Belanja	96.985.282.581	-	0,00
1.	Belanja Operasi	94.025.144.881	-	0,00
1.1	Belanja Pegawai	9.328.703.000	-	0,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.696.441.881	-	0,00
2	Belanja Modal	2.960.137.700	-	0,00
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.762.137.700	-	0,00
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000	-	0,00

Komposisi belanja T.A 2022 sebagaimana tampilan table diatas dapat dilihat pada figure grafik berikut ini :



Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk urusan dasar Organisasi Pemerintah Provinsi, Urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan transmigrasi. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2022 sebagaimana berikut :

I. Urusan Dasar Organisasi Pemerintah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 18.264.526.430,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.922.415.245,- atau 98,13 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 342.111.185,-

II. Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 294.432.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 284.537.000,- atau 96,64%. Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.895.000,-
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 34.490.364.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.627.535.350,- atau 77,20%. Sisa anggaran sebesar Rp. 7.862.829.150,-
3. Program Penempatan Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 32.054.589.901,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.132.600.201,- atau 72,17 %. Sisa Anggaran sebesar Rp. 8.921.989.700,-
4. Program Hubungan Industrial, pagu anggaran sebesar Rp. 1.946.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.925.674.000,- atau 98,91%. Sisa anggaran sebesar Rp. 21.279.000
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, pagu anggaran sebesar Rp. 599.999.846,- dengan realisasi sebesar Rp. 599.672.346,- atau 99,95 %

III. Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 110.309.789,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.835.230,- atau 99,57%
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 391.249.224,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.147.224,- atau 99,21%
3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Termasuk didalamnya Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal); pagu anggaran sebesar Rp. 2.655.872.585,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.654.540.535,- atau 99,95%

Selengkapnya pelaksanaan anggaran (Realisasi Anggaran) untuk Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN	(%)	
2.07.3.32.0.00.01	BELANJA DAERAH	96.985.282.581	79.320.190.696	81,79	17.665.091.885
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.283.680.931	74.124.258.896	81,20	17.159.422.035
2.07	Tenaga Kerja	91.283.680.931	74.124.258.896	81,20	17.159.422.035
2.07 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.264.526.430	17.922.415.245	98,13	342.111.185
2.07 . 01 . 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.560.034.178	1.535.332.804	98,42	24.701.374
2.07 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	554.622.200	552.845.400	99,68	1.776.800
2.07 . 01 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	111.541.682	111.503.682	99,97	38.000
2.07 . 01 . 1.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	93.353.550	93.353.550	100,00	-
2.07 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	123.747.469	110.929.600	89,64	12.817.869
2.07 . 01 . 1.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	103.104.572	97.052.572	94,13	6.052.000
2.07 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.654.205	107.957.500	97,56	2.696.705
2.07 . 01 . 1.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.010.500	461.690.500	99,71	1.320.000
2.07 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.797.884.500	9.694.687.441	98,95	103.197.059
2.07 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.217.463.000	9.117.954.941	98,92	99.508.059
2.07 . 01 . 1.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	165.000.000	165.000.000	100,00	-
2.07 . 01 . 1.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.440.000	130.751.000	97,98	2.689.000
2.07 . 01 . 1.02 . 06	Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	87.571.500	87.571.500	100,00	-
2.07 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	194.410.000	193.410.000	99,49	1.000.000
2.07 . 01 . 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	426.728.000	418.178.000	98,00	8.550.000
2.07 . 01 . 1.03 . 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	54.162.000	52.100.000	96,19	2.062.000
2.07 . 01 . 1.03 . 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	148.306.000	148.306.000	100,00	-
2.07 . 01 . 1.03 . 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	165.260.000	161.432.000	97,68	3.828.000
2.07 . 01 . 1.03 . 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	59.000.000	56.340.000	95,49	2.660.000
2.07 . 01 . 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	771.675.841	736.751.500	95,47	34.924.341
2.07 . 01 . 1.05 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	-	-	10.000.000
2.07 . 01 . 1.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.500.000	96.304.000	99,80	196.000
2.07 . 01 . 1.05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.582.841	18.759.500	91,14	1.823.341
2.07 . 01 . 1.05 . 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	93.701.000	88.623.000	94,58	5.078.000
2.07 . 01 . 1.05 . 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	63.600.000	57.600.000	90,57	6.000.000
2.07 . 01 . 1.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	216.813.000	216.813.000	100,00	-
2.07 . 01 . 1.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	270.479.000	258.652.000	95,63	11.827.000

RENJA 2024

2.07 . 01 . 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.221.952.050	2.151.087.700	96,81	70.864.350
2.07 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40.000.000	100,00	-
2.07 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.601.050	133.594.000	99,99	7.050
2.07 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.000.000	65.000.000	100,00	-
2.07 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.000.000	129.966.000	99,97	34.000
2.07 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.400.000	70.000.000	96,69	2.400.000
2.07 . 01 . 1.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	85.600.000	57,07	64.400.000
2.07 . 01 . 1.06 . 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	90.720.000	90.000.000	99,21	720.000
2.07 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.540.231.000	1.536.927.700	99,79	3.303.300
2.07 . 01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.800.521.400	1.727.096.000	95,92	73.425.400
2.07 . 01 . 1.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.000.000	368.925.000	98,38	6.075.000
2.07 . 01 . 1.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	963.930.000	917.610.000	95,19	46.320.000
2.07 . 01 . 1.07 . 05	Pengadaan Mebel	162.591.400	156.581.000	96,30	6.010.400
2.07 . 01 . 1.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.000.000	48.980.000	99,96	20.000
2.07 . 01 . 1.07 . 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
2.07 . 01 . 1.07 . 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	235.000.000	94,00	15.000.000
2.07 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.341.105	747.946.124	99,42	4.394.981
2.07 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.914.000	79.992.000	98,86	922.000
2.07 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.629.600	103.371.396	96,94	3.258.204
2.07 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564.797.505	564.582.728	99,96	214.777
2.07 . 01 . 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	933.389.356	911.335.676	97,64	22.053.680
2.07 . 01 . 1.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	564.400.000	557.047.977	98,70	7.352.023
2.07 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.989.356	220.848.699	98,60	3.140.657
2.07 . 01 . 1.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	-	-	10.000.000
2.07 . 01 . 1.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.000.000	133.439.000	98,84	1.561.000
2.07 . 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	294.432.000	284.537.000	96,64	9.895.000
2.07 . 02 . 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	294.432.000	284.537.000	96,64	9.895.000
2.07 . 02 . 1.01 . 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	194.432.000	185.665.000	95,49	8.767.000
2.07 . 02 . 1.01 . 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	100.000.000	98.872.000	98,87	1.128.000
2.07 . 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	34.490.364.500	26.627.535.350	77,20	7.862.829.150
2.07 . 03 . 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	33.745.639.500	25.895.395.350	76,74	7.850.244.150
2.07 . 03 . 1.01 . 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	32.637.279.500	24.808.551.350	76,01	7.828.728.150
2.07 . 03 . 1.01 . 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	128.360.000	128.360.000	100,00	-
2.07 . 03 . 1.01 . 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	980.000.000	958.484.000	97,80	21.516.000

2.07 . 03 . 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	371.084.000	370.965.000	99,97	119.000
2.07 . 03 . 1.02 . 01	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	371.084.000	370.965.000	99,97	119.000
2.07 . 03 . 1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	126.337.000	119.863.000	94,88	6.474.000
2.07 . 03 . 1.03 . 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	126.337.000	119.863.000	94,88	6.474.000
2.07 . 03 . 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	247.304.000	241.312.000	97,58	5.992.000
2.07 . 03 . 1.04 . 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	247.304.000	241.312.000	97,58	5.992.000
2.07 . 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	32.054.589.901	23.132.600.201	72,17	8.921.989.700
2.07 . 04 . 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	31.525.363.450	22.630.172.250	71,78	8.895.191.200
2.07 . 04 . 1.01 . 02	Pelayanan Antar Kerja	72.543.000	61.213.000	84,38	11.330.000
2.07 . 04 . 1.01 . 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	224.628.000	224.628.000	100,00	-
2.07 . 04 . 1.01 . 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	153.136.000	153.136.000	100,00	-
2.07 . 04 . 1.01 . 05	Perluasan Kesempatan Kerja	31.075.056.450	22.191.195.250	71,41	8.883.861.200
2.07 . 04 . 1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.934.000	67.370.000	84,28	12.564.000
2.07 . 04 . 1.02 . 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	79.934.000	67.370.000	84,28	12.564.000
2.07 . 04 . 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	246.287.451	237.485.951	96,43	8.801.500
2.07 . 04 . 1.03 . 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	96.609.951	94.808.951	98,14	1.801.000
2.07 . 04 . 1.03 . 03	Job Fair/Bursa Kerja	149.677.500	142.677.000	95,32	7.000.500
2.07 . 04 . 1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	101.131.000	101.131.000	100,00	-
2.07 . 04 . 1.05 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan,	101.131.000	101.131.000	100,00	-
2.07 . 04 . 1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	101.874.000	96.441.000	94,67	5.433.000
2.07 . 04 . 1.06 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	101.874.000	96.441.000	94,67	5.433.000
2.07 . 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.946.953.000	1.925.674.000	98,91	21.279.000
2.07 . 05 . 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.627.270.000	1.609.576.000	98,91	17.694.000
2.07 . 05 . 1.02 . 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.277.270.000	1.269.960.000	99,43	7.310.000
2.07 . 05 . 1.02 . 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	350.000.000	339.616.000	97,03	10.384.000

RENJA 2024

2.07 . 05 . 1.03	<i>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)</i>	319.683.000	316.098.000	98,88	3.585.000
2.07 . 05 . 1.03 . 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	319.683.000	316.098.000	98,88	3.585.000
2.07 . 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	4.232.815.100	4.231.497.100	99,97	1.318.000
2.07 . 06 . 1.01	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</i>	4.232.815.100	4.231.497.100	99,97	1.318.000
2.07 . 06 . 1.01 . 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.178.605.100	1.178.550.100	100,00	55.000
2.07 . 06 . 1.01 . 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	54.210.000	52.980.000	97,73	1.230.000
2.07 . 06 . 1.01 . 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	3.000.000.000	2.999.967.000	100,00	33.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.701.601.650	5.195.931.800	-	505.669.850
3.32	Transmigrasi	5.701.601.650	5.195.931.800	-	505.669.850
3.32 . 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	591.195.250	484.870.000	82,02	106.325.250
3.32 . 02 . 1.01	<i>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	591.195.250	484.870.000	82,02	106.325.250
3.32 . 02 . 1.01 . 01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	514.171.250	410.560.000	79,85	103.611.250
3.32 . 02 . 1.01 . 03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	77.024.000	74.310.000	96,48	2.714.000
3.32 . 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.253.804.400	1.917.778.550	85,09	336.025.850
3.32 . 03 . 1.01	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	2.253.804.400	1.917.778.550	85,09	336.025.850
3.32 . 03 . 1.01 . 02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	316.358.000	307.410.000	97,17	8.948.000
3.32 . 03 . 1.01 . 05	Penyuluhan Transmigrasi	139.107.350	127.555.000	91,70	11.552.350
3.32 . 03 . 1.01 . 06	Pelatihan Transmigrasi	1.798.339.050	1.482.813.550	82,45	315.525.500
3.32 . 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.856.602.000	2.793.283.250	97,78	63.318.750
3.32 . 04 . 1.01	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</i>	2.856.602.000	2.793.283.250	97,78	63.318.750
3.32 . 04 . 1.01 . 01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	99.999.750	92.060.000	92,06	7.939.750
3.32 . 04 . 1.01 . 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	2.756.602.250	2.701.223.250	97,99	55.379.000
	J U M L A H	96.985.282.581	79.320.190.696	81,79	17.665.091.885



Sonfi, 31 Desember 2022

Kepala Dinas

Nurlaila Muhammad, MM, M.Pd
NIP. 19770404 200501 2 025

Capaian Kinerja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola administrasi dan manajemen yang efektif serta penyediaan data dan informasi	Cakupan layanan administrasi perkantoran dalam menunjang tupoksi perkantoran	%	LKj > 80%	98%	123%
2.	Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja yang layak dalam hubungan industrial yang kondusif serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang dinamis	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi	%	40%	4,50%	11,25%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta / Orang)	Rp	65,83	68,80	104,51%
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	1.000	14.866	148660%
		Persentase sengketa Hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	Sengketa	100,00%	92,59%	92,59%
		Persentase Penegakan K3 oleh Perusahaan terdaftar dalam WLKP Online	Perusahaan	40%	7,76%	19,4%
3.	Berkembangnya kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dok	4 Dok	2	50%
		Jumlah kawasan Transmigrasi yang dibangun	Kawasan /UPT	1	1	50%
		Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan /UPT	2	0	0%

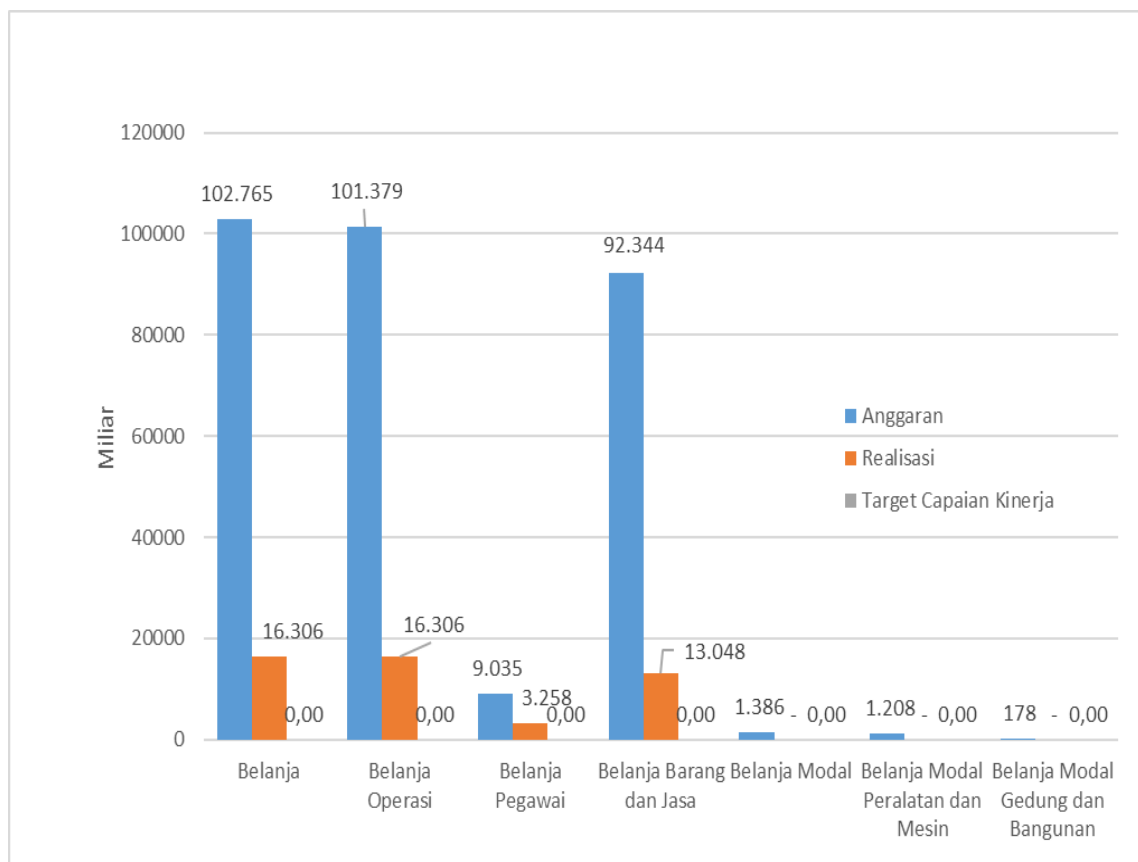
2.1.2 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Terhadap Capaian Rencana Strategis 2020-2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2023 memiliki anggaran belanja daerah (APBD) sebagaimana table berikut :

Tabel 1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Target Capaian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran November o2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Target Capaian Kinerja
I	Belanja	102.764.943.532	16.306.231.418	15,87
1.	Belanja Operasi	101.378.754.832	16.306.231.418	16,08
1.1	Belanja Pegawai	9.034.959.000	3.257.875.746	36,06
1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.343.795.832	13.048.355.672	14,13
2	Belanja Modal	1.386.188.700	-	0,00
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.208.188.700	-	0,00
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.000.000	-	0,00

Komposisi antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Rincian Anggaran belanja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 sebagaimana berikut :

IV. Urusan Dasar Organisasi Pemerintah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 14.325.605.633,-. Untuk realisasi Anggaran sampai dengan bulan Mei belum dapat diakses pada system Penatausahaan Keuangan (SIPD-RI).

V. Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 472.943.350,-
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 39.859.361.100,-
4. Program Penempatan Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 35.905.620.539,-
5. Program Hubungan Industrial, pagu anggaran sebesar Rp. 500.396.250,-
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.126.850,-

VI. Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 945.849.500,-
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 2.505.047.040,-
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Termasuk didalamnya Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal); pagu anggaran sebesar Rp. 3.749.993.270,-

Selengkapnya pelaksanaan anggaran untuk Program dan Kegiatan diatas untuk tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2023.

Capaian Kinerja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola administrasi dan manajemen yang efektif serta penyediaan data dan informasi	Cakupan layanan administrasi perkantoran dalam menunjang tupoksi perkantoran	%	LKj > 80%	98%	123%
2.	Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja yang layak dalam hubungan industrial yang kondusif serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang dinamis	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi	%	50%	5,38%	10,76%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta / Orang)	Rp	75,98	0%*	0,00%
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	1500	1327	88,47
		Persentase sengketa Hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	Sengketa	100,00%	50,00%	50%
		Persentase Penegakan K3 oleh Perusahaan terdaftar dalam WLKP Online	Perusahaan	50%	8,43%	17%
3.	Berkembangnya kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dok	4 Dok	2	50%
		Jumlah kawasan Transmigrasi yang dibangun	Kawasan /UPT	1	1	50%
		Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan /UPT	2	0	0%

Realisasi Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama di Tahun Anggaran 2023 secara umum tidak dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Ketidakaapaian target indikator utama pada sektor Ketenagakerjaan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Anggaran untuk program Pelatihan tenaga kerja berdasarkan kluster kompetensi masih sangat rendah, sehingga tidak dapat mengakomodir minat pencari kerja dalam program Pelatihan berbasis Kompetensi ini;

2. Jumlah LPTKS yang bergerak pada jenis Pelatihan Tekhnis masih sangat minim di Provinsi Maluku Utara. Alhasil minat pencaker untuk dapat mengikuti Pelatihan-pelatihan Tekhnis tersebut seperti Pelatihan Operator Alat Berat dll hanya berharap pada kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Disnaker) serta UPT Kementerian Tenaga Kerja di daerah yang juga memiliki keterbatasan dalam penganggaran.
3. Pada indikator “jumlah tenaga kerja yang ditempatkan”, ketidakcapaian target lebih disebabkan karena banyak pencaker yang tidak dapat diterima dalam proses rekrutmen dikarenakan tidak memiliki Kompetensi/skil yang diharapkan oleh Perusahaan.
4. Untuk indikator penyelesaian sengketa Hubungan industrial, ketidakcapaian target ini disebabkan oleh adanya pemotongan/pergeseran anggaran untuk penyelesaian Kasus sehingga menyebabkan banyak Kasus yang tidak dapat ditindak lanjuti proses penyelesaiannya.
5. Sedangkan pada indikator “ Penegakan K3 di Perusahaan”, ketidakberhasilan dalam mencapai target karena selain anggaran kegiatan yang masih sangat minim juga disebabkan karena jumlah aparatur pengawas yang masih sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 8 orang, sehingga para aparatur tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor Ketramigrasian, dimana Disnakertrans Provinsi Maluku Utara belum dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini lebih disebabkan karena minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara

Urusan Pemerintahan Daerah secara langsung merupakan wilayah/lingkup kerja bagi pemerintah daerah, yang penyelenggaraannya di distribusikan sesuai dengan susunan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan. Sebagai wilayah

kerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memiliki ukuran minimal yang dituntut untuk dipenuhi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 11 Huruf (4) dinyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengertian SPM dinyatakan sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja diarahkan pada 2 (dua) indikator yaitu “Produktifitas Tenaga Kerja Daerah” dan “Tingkat Kesempatan Kerja layak”. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di sektor ketenagakerjaan, memiliki kewajiban untuk merealisasikan 2 (Dua) indikator tersebut dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk sector Ketenagakerjaan tersebut disandarkan pada SPM Ketenagakerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Permenakertrans Nomor 04 /MEN/IV/2011 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, meliputi: (1) Pelayanan Pelatihan Kerja (2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (4) Pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta (5) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk dapat melihat sejauhmana pencapaian target terhadap standar Pelayanan minimal yang akan dilaksanakan yang dihubungkan dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan maka diperlukan formulasi-formulasi perhitungan yang sesuai sebagaimana berikut :

1. *Pelayanan Pelatihan Kerja*

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelayanan pelatihan kerja terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;
- 2) Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar;
- 3) Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan pelatihan kerja ditargetkan pada tahun 2024 yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis kompetensi sebesar 75 persen;
- 2) Pelatihan berbasis masyarakat sebesar 60 persen;
- 3) Pelatihan kewirausahaan sebesar 60 persen.

Pelayanan Pelatihan Kerja dimaksudkan untuk dapat memberdayakan para pencari kerja sehingga mudah terserap pada dunia usaha ataupun dapat memberdayakan diri dengan membuka lapangan kerja baru. Selain itu dengan pelatihan kerja ini pemerintah bisa menekan tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk mengetahui presentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Formulasi yang dapat digunakan yaitu :

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

2. *Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.*

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja, sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.

Pelayanan penempatan tenaga kerja terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu :

- 1) Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL) adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 2) Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD) adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
- 3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri adalah pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar negara (AKAN) yakni penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan penempatan tenaga kerja ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70 persen.

Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan jaminan sosial bagi pekerja/buruh ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 60 persen.

Formulasi Rumus yang digunakan dalam mengukur presentase kemajuan indicator yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Pencaker yang Ditempakan}}{\text{Jumlah Pencaker yang Terdaftar}} \times 100$$

3. *Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, sedangkan mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Formulasi yang digunakan dalam mengukur presetase penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh mediator yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan dalam Tahun n}}{\text{Jumlah Target Kasus dalam Tahun n}} \times 100$$

4. *Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh*

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Sedangkan badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Formulasi yang digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan SPM ini adalah yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar Pada WLKP Online}} \times 100$$

5. *Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan*

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu obyek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.

Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan ditargetkan pada tahun 2024 meliputi :

- 1) Pemeriksaan perusahaan sebesar 45 persen;
- 2) Pengujian peralatan sebesar 50 persen.

Formulasi Rumus yang digunakan dalam mengukur presentase kemajuan indicator yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma K3}}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online}} \times 100\%$$

Merujuk kepada formulasi-formulasi perhitungan diatas, maka diperoleh hasil capaian Kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel. TC. 30. Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara 2020 s/d 2023**

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi	%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	70,00%	0	0	4,50	5,38	0	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta / Orang)	Rp	50,72	57,35	65,83	75,98	88,79	50,72%	57,35	68,8	BPS*	0	
3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	500	750	1000	1500	2250	0	0	14866	1327	0	
4	Persentase sengketa Hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,59%	50%	0%	
5	Persentase Penegakan K3 oleh Perusahaan terdaftar dalam WLKP Online	%	20%	30%	40%	50%	70%	14,55%	18,11%	7,76%	8,43	0	
6	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dok	2	3	4	5	5	0	1	2	4	0	
7	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dibangun	Kawasan /UPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
8	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan /UPT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
9	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dalam menunjang Tupoksi Perkantoran	%	LKj>80%	LKj>80%	LKj>80%	LKj>80%	LKj>80%	89,22	87,35	81,79	79	0	

Sebagaimana tergambar pada table diatas menunjukkan Penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dalam kaitannya terhadap tingkat kinerja pelayanan dalam rentang waktu Tahun Anggaran 2020 s/d 2023, di hampir semua indikator belum dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Pada indikator “Persentase Tenaga Kerja Yang dilatih berbasis Kompetensi”, permasalahan yang mendasari ketidakcapaian target adalah kurangnya anggaran yang diberikan serta masih kurangnya LPTKS yang berkreditasi dalam menyelenggaran kegiatan Pelatihan Tekhnis/Keahlian yang sangat dibutuhkan oleh Perusahaan industry pertambangan.

Adanya kelemahan aparatur dinas didalam administrasi pendataan pencaker yang telah ditempatkan baik itu di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi penyebab ketidakcapaian target pada Indikator “Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan”. Kelemahan ini telah mengakibatkan data pencaker yang telah

ditempatkan menjadi tidak valid dan diragukan kebenarannya. Disisi lain kepatuhan Perusahaan didalam melaporkan jumlah karyawannya baik yang ditempatkan maupun yang di PHK juga masih sangat rendah.

Ketidakcapaian Indikator “Persentase Penegakan K3 oleh Perusahaan terdaftar dalam WLKP Online”, selain karena pengalokasian anggaran yang masih cukup rendah juga disebabkan oleh pengadministrasian pendataan Pengawasan K3 yang tidak tertata secara baik, sehingga menyebabkan data Pengawasan K3 yang terhimpun tidak terkelola secara tertib dan benar. Disisi lain Kinerja aparatur Pengawas Ketenagakerjaan juga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan jumlah aparatur pengawas Ketenagakerjaan yang dimiliki masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah Perusahaan yang akan diawasi.

Kondisi Kinerja Pelayanan yang cukup membaik dapat terlihat pada Indikator Kinerja “Persentase sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)”, dimana di 2 tahun pertama (2020 dan 2021) Kinerja yang dihasilkan mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh sengketa Hubungan Industrial dapat diselesaikan sesuai dengan jumlah sengketa yang didaftarkan. Namun untuk 2 Tahun berikutnya (2022 dan 2023) agak mengalami penurunan Kinerja dengan capaian 92% dan 50%. Penurunan capaian kinerja ini lebih disebabkan karena jumlah sengketa Hubungan Industrial yang didaftarkan yang semakin banyak yang berkoerelasi dengan semakin bertambahnya Perusahaan yang beroperasi (sektor Pertambangan) dan tidak diikuti dengan bertambahnya Aparatur Mediator pada Disnakertrans Prov. Maluku Utara yang sampai saat ini hanya berjumlah 1 Orang. Kondisi yang ada mengakibatkan proses Pelayanan mediasi tidak berjalan secara maksimal.

Pada Indikator “Tingkat produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Orang)”, Kinerja yang dihasilkan berada pada posisi yang positif, dimana disetiap tahun terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi oleh karena adanya Pengawasan Ketenagakerjaan oleh aparatur pengawas yang cukup baik walaupun dengan keterbatasa personil yang ada. Juga adanya komunikasi yang baik oleh Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang membawahi sektor Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Penampatan Tenaga

Kerja dengan Pihak Perusahaan yang beroperasi sehingga dapat terjalin Hubungan kerjasama yang cukup baik dalam penanganan perekrutan dan penempatan serta peningkatan Kompetensi tenaga kerja.

Pada Sektor Ketransmigrasian terdapat 3 (Tiga) indikator utama yang menjadi sandaran dalam menilai Kinerja Pelayanan Dinas. Dari tampilan table TC.30 diatas terlihat bahwa Kinerja yang dihasilkan oleh sektor Ketransmigrasian sangat baik, dimana seluruh target capaian yang ditetapkan dapat terpenuhi. Kinerja yang kurang baik hanya tergambar pada Indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi”. Kondisi ketidakberhasilan dalam menyediakan dokumen Perencanaan Kawasan ini lebih disebabkan adanya pergeseran anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas Pemerintah daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Kementrian terkait serta dengan instansi teknis Kabupaten Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada sector Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi maluku Utara diberi tugas untuk melaksanakan berbagai Pelatihan vokasi yang bekerjasama dengan balai Latihan Kerja Ternate dengan target sebanyak 160 orang di tahun 2023. Terkait dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kabupaten / Kota, program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2023 ini meliputi Pelatihan Kerja berdasarkan kluster kompetensi, Sertifikasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten/Kota, serta bantuan Pemberdayaan Masyarakat. Berbagai program yang telah di rencanakan tersebut adalah bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis daerah seperti penurunan angka pengangguran terbuka, Perluasan Kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah.

Pada sector hubungan industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja isu strategis yang menjadi perhatian Dinas yaitu permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Pertambangan dan Potensi meningkatnya sengketa pekerja dan Perusahaan, serta masih rendahnya kompetensi para pekerja local daerah untuk memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Berbagai persoalan Ketenagakerjaan tersebut khususnya pada 3 (Tiga) isu strategis tersebut sering dilaporkan dan dibahas dalam berbagai rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Mensikapi berbagai persoalan Ketenagakerjaan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan kegiatan sertifikasi operator alat berat di beberapa Kabupaten/kota, peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan diperusahaan pertambangan serta sosialisasi peraturan Ketenagakerjaan baik di perusahaan maupun di Masyarakat umum khususnya kepada para pencari Kerja.

Kesenjangan wilayah dan tingkat kemiskinan adalah merupakan isu strategis yang dikaitkan pada sector Ketramigrasian. Terindikasi bahwa pada beberapa Kawasan transmigrasi di provinsi Maluku Utara turut memberikan andil dalam memperlebar kesenjangan wilayah dan tingkat kemiskinan tersebut. Untuk menurunkan laju kesenjangan wilayah dan tingkat kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara yang bekerjasama dengan Kabupaten/Kota akan melakukan pendataan serta evaluasi terhadap perkembangan pembangunan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Maluku Utara. Hasil evaluasi ini akan dibukukan dalam bentuk Road Map Pembangunan Ketramigrasian atau semacamnya. Hasil penelaahan terhadap dokumen tersebut akan ditindaklanjuti dengan berbagai program/kegiatan berskala prioritas (disesuaikan dengan anggaran yang tersedia)

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Pengembangan Pelayanan

Dalam pelaksanaan program /Kegiatan sebagai bentuk Pelayanan terhadap masyarakat, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi provinsi Maluku Utara diperhadapkan dengan berbagai permasalahan dan hambatan. Beberapa hambatan dan permasalahan tersebut seperti :

1. Masih kurangnya tenaga Tekhnis aparatur Pengawas Ketenagakerjaan. Saat ini jumlah aparatur pengawas Ketenagakerjaan di Dinas berjumlah sebanyak 7 Orang (aktif) dan 2 Orang (Tidak Aktif / Pejabat Struktural)
2. Masih kurangnya tenaga Tekhnis aparatur Mediator Hubungan Industrial. Saat ini jumlah aparatur Mediator Hubungan Industrial di Dinas berjumlah sebanyak 1 Orang (aktif) dan 1 Orang (Tidak Aktif)
3. Belum adanya Pejabat Fungsional yang menangani sector penempatan tenaga kerja seperti Aparatur Fungsional Pengantar Kerja dan aparatur Fungsional lainnya.
4. Lokasi Objek Pengawasan Perusahaan dan Kawasan Transmigrasi yang berada jauh di daerah terpencil dan Rawan terhadap kecelakaan.
5. Alokasi anggaran yang kecil baik yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten Kota, menjadikan program/kegiatan pembangunan Kawasan Transmigrasi agak melambat.
6. Masih kurangnya Lembaga Pelatihan kerja yang bersertifikat.
7. Masih lemahnya tata kelola administrasi pendataan sehingga menyulitkan dalam pengolahan data untuk Perencanaan dan Penganggaran.

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan dasar standar pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut :

1) Tantangan Pada Sektor Ketenagakerjaan

1. Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang berinvestasi di Propinsi Maluku Utara memberikan tantangan tersendiri terhadap kesiapsiagaan aparatur pengawas Ketenagakerjaan dalam merespon berbagai laporan K3 yang masuk;
2. Semakin banyaknya laporan perselisihan hubungan industrial yang terdaftar.

3. Arus pendatang pencari kerja dari luar Propinsi yang semakin meningkat (banyak);
4. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja local yang berpendidikan SMK dan Sarjana;
5. Banyaknya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta non Tekhnis yang belum tersertifikasi
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih rendah;
7. Masih rendahnya kesadaran pihak perusahaan dalam melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online ;

2) Peluang Pada Sektor Ketenagakerjaan

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, terdapat beberapa peluang yang dapat dipakai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan yang ada serta mempermudah aspek Pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1. Pertumbuhan perekonomian Provinsi Maluku Utara yang cukup baik
2. Angka pengangguran terbuka yang terus menurun;
3. Bertambahnya calon Mediator baru sebanyak 2 orang, yang sebelumnya hanya berjumlah 1 orang.
4. Telah diluncurkan Aplikasi Folamunara oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara yang di maksudkan untuk mempermudah Instansi Tekhnis di Kabupaten/Kota dan masyarakat umum dalam mengusulkan berbagai permohonan bantuan untuk peningkatan kewirausahaan masyarakat.;
5. Adanya kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan beberapa perusahaan skala menengah dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal melalui Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
6. Telah terjalinnya kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan beberapa Sekolah Kejuruan Menengah Atas serta perusahaan

industry dalam bidang peningkatan keahlian siswa melalui Pelatihan dan pemagangan;

3). Tantangan Pada Sektor Ketrasmigrasian

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di bidang ketrasmigrasian adalah :

1. Indeks Pengembangan Kawasan Transmigrasi saat ini berada pada level Berkembang dan selanjutnya akan diupayakan untuk meningkat pada level Mandiri.
2. Masih terdapat kurang lebih 2.400 Ha lahan permukiman Transmigrasi yang belum terpakai.
3. Terdapat beberapa Kawasan Transmigrasi yang berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, sehingga memerlukan penyelesaian terhadap status Kawasan hutan tersebut.
4. Kawasan Transmigrasi termasuk dalam wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi .
5. Terdapat beberapa Kawasan Transmigrasi yang ditinggal pergi oleh para transmigran;
6. Tingkat pembangunan UPT pada Kawasan Transmigrasi masih cukup rendah

4). Peluang Pada Sektor Ketrasmigrasian, meliputi :

1. Semakin baiknya (meningkatnya) pendapatan Keuangan daerah, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pada sector Ketrasmigrasian.
2. Masih banyaknya lahan usaha produktif di permukiman transmigrasi yang dapat diusahakan untuk meningkatkan pendapatan Transmigran.
3. Program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi oleh pemerintah pusat diharapkan menjadi awal kebangkitan bagi pembangunan Kawasan Transmigrasi.

4. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera yang menjadi program prioritas daerah Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat membuka akses transportasi darat yang lebih baik untuk membuka keterisolasian Kawasan Transmigrasi.

2.3.3. Formulasi dan Isu-Isu Penting Pada Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Perumusan program dan kegiatan pada sector Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dilandaskan pada beberapa Isu-isu penting yang berkembang dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai isu tersebut yaitu :

1. Produktifitas tenaga kerja daerah belum sepenuhnya berada pada angka yang optimal.
2. masih terbatasnya kesempatan kerja layak, yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pasokan angkatan kerja dimana lebih dari 50 persennya berkualifikasi pendidikan SMP ke bawah (termasuk mereka yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah);
3. Penurunan tingkat pengangguran belum seiring dengan ketersediaan kesempatan produktif dan pekerjaan layak dimana lebih dari 60 persen proporsi status pekerjaan berasal dari sektor informal, dengan rasio status pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar mencapai 41,2 persen;
4. Masih minimnya layanan pendidikan/keterampilan kewirausahaan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak;
5. Masih terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa pekerja;
6. Belum optimalnya pengelolaan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja.

Pada Sektor Ketransmigrasian is-isu penting yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan di Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Masih kurangnya sarana prasarana dasar yang dibangun di permukiman transmigrasi;
2. Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan;
3. Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai;

4. Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian;
5. Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi;
6. Adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi
7. Masih cukup tinggi tingkat kemiskinan pada Kawasan Transmigrasi
8. Kurang berkembangnya Kawasan Transmigrasi mempengaruhi tingkat kesenjangan wilayah.

RENJA 2024



RENJA 2024

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut :

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				15.508.166.957	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				47.735.000.000	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	100%	11.388.166.957	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	100%	23.835.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, 1.1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100.000.000	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	680.000.000	
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	10.000.000	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	150.000.000	
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	50.000.000	
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	40.000.000	
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	50.000.000	
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	40.000.000	
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	10.000.000	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	50.000.000	
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	40.000.000	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	300.000.000	

RENJA 2024

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	10.573.808.000	1. Administrasi Keuangan 2 Perangkat Daerah	Dinas	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	10.800.000.000	
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 Orang	10.523.808.000	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 Orang	10.500.000.000	
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	-	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	50.000.000	
	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	10.000.000	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	35.000.000	
	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	10.000.000	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	50.000.000	
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10.000.000	5) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	50.000.000	
	6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	10.000.000	6) Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	35.000.000	
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Lap	10.000.000	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Lap	50.000.000	
	8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	-	8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	30.000.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	20.000.000	1. Administrasi Barang Milik 3. Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	165.000.000	

RENJA 2024

	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	30.000.000	
	2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	25.000.000	
	4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000.000	4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	50.000.000	
	5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000.000	5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	30.000.000	
	6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	-	6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	30.000.000	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%	35.000.000	1. Administrasi Kepegawaian 5 Perangkat Daerah	Dinas	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%	245.000.000	
	3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	-	3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	30.000.000	
	5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	20.000.000	5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	35.000.000	
	6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	-	6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	30.000.000	
	7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	
	8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	-	8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	35 Orang	50.000.000	

RENJA 2024

	Bimbingan Teknis 9 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	15.000.000	Bimbingan Teknis 9 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	50.000.000	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	360.358.957	1. Administrasi Umum Perangkat 6 Daerah	Dinas	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.400.000.000	
	Penyediaan Komponen 1) Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen 1) Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Tagga yang disediakan	1 Paket	-	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Tagga yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	5.000.000	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	10.358.957	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	100.000.000	
	6) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Dinas	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	20 Dok	10.000.000	6) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Dinas	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia	20 Dok	50.000.000	
	7) Penyediaan Bahan/Material	Dinas	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	20.000.000	7) Penyediaan Bahan/Material	Dinas	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	130.000.000	
	8) Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	-	8) Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	50.000.000	
	9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	300.000.000	9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	900.000.000	
	10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	-	10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	30.000.000	
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Persentase pengadaan BMD yang dilaksanakan	100%	-	1.7 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Persentase pengadaan BMD yang dilaksanakan	100%	8.900.000.000	
	Pengadaan Kendaraan 1) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan 1) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	Banyak kendaraan Dinas yang telah rusak /

RENJA 2024

	Pengadaan Kendaraan 2) Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Kendaraan 2) Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	350.000.000	Banyak kendaraan Dinas yang telah rusak /
	3) Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	3) Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Pengadaan Gedung 4) Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	-	Pengadaan Gedung 4) Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	8.000.000.000	Bangunan Kantor Dinas belum selesai di bangun
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	249.000.000	1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	960.000.000	
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	10.000.000	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	60.000.000	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	50.000.000	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	150.000.000	
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	-	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	50.000.000	
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	189.000.000	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	700.000.000	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50.000.000	1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	685.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1) Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1) Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2) Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2) Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	150.000.000	
	3) Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	-	3) Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000	
	4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	-	4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000	

RENJA 2024

	Pemeliharaan/Rehabilitasi 5) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi 5) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	75.000.000	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prov. Maluku Utara	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	100%	30.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prov. Maluku Utara	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	100%	300.000.000	
2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prov. Maluku Utara	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%	30.000.000	2.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prov. Maluku Utara	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%	300.000.000	
	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Prov. Maluku Utara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah	10 Dok	-	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Prov. Maluku Utara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah	10 Dok	150.000.000	
	2) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab/Kota	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	-	2) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab/Kota	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	150.000.000	
	3) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab/Kota	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	30.000.000	2) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab/Kota	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	150.000.000	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prov. Maluku Utara	Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	1,85%	390.000.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prov. Maluku Utara	Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	1,85%	4.150.000.000	
3.1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Prov. Maluku Utara	Cakupan pelatihan Tenaga Kerja berdasarkan klaster kompetensi	100%	320.000.000	3.1 Berdasarkan Klaster Kompetensi	Prov. Maluku Utara	Cakupan pelatihan Tenaga Kerja berdasarkan klaster kompetensi	100%	3.600.000.000	
	1 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster Kompetensi	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	300 Orang	280.000.000	1 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster Kompetensi	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	300 Orang	3.000.000.000	
	2 Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kab/Kota	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	20.000.000	2 Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kab/Kota	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	100.000.000	
	3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	3 Unit	20.000.000	3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	3 Unit	500.000.000	
3.2.	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Prov. Maluku Utara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	100%	20.000.000	3.2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Prov. Maluku Utara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	100%	150.000.000	
	1) Survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja	Kab/Kota	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	20.000.000	1) akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja	Kab/Kota	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	150.000.000	

RENJA 2024

3.3.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Prov. Maluku Utara	Cakupan pelayanan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	100%	20.000.000	3.3.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Prov. Maluku Utara	Cakupan pelayanan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	100%	100.000.000	
	1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan menengah	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	6 Perusahaan	20.000.000		1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan menengah	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	6 Perusahaan	100.000.000	
3.4.	Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Besaran Dokumen Pengukuran Produktivitas Daerah	100%	30.000.000	3.4.	Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Besaran Dokumen Pengukuran Produktivitas Daerah	100%	300.000.000	
	1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dok	30.000.000		1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dok	300.000.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prov. Maluku Utara	Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	10,0%	410.000.000		Program Penempatan Tenaga Kerja	Prov. Maluku Utara	Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	10,0%	3.850.000.000	
1.	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Maluku Utara	Cakupan Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	100%	320.000.000	1.	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Maluku Utara	Cakupan Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	100%	3.400.000.000	
	1) Pelayanan Sumber daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	10.000.000		1) Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Dinas	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang tersedia dan / atau ditingkatkan kompetensinya	2 Orang	200.000.000	
	2) Pelayanan Antar Kerja	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	100 Orang	20.000.000		2) Pelayanan Antar Kerja	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	100 Orang	50.000.000	
	3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kab/Kota	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	20.000.000		3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kab/Kota	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	100.000.000	
	4) Pembinaan Operasional pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	25 Orang	20.000.000		4) Pembinaan Operasional pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	25 Orang	50.000.000	
	5) Perluasan Kesempatan Kerja	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang	250.000.000		5) Perluasan Kesempatan Kerja	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang	3.000.000.000	
2.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Prov. Maluku Utara	Cakupan penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.000.000	2.	Penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Prov. Maluku Utara	Cakupan penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	

RENJA 2024

	2) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab/Kota	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	20.000.000	2) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab/Kota	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	50.000.000	
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prov. Maluku Utara	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	100%	60.000.000	3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prov. Maluku Utara	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	100%	200.000.000	
	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab/Kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	200 Orang	10.000.000	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab/Kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	200 Orang	50.000.000	
	2) Pameran Bursa Kerja / Job Fair	Kab/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	50.000.000	2) Pameran Bursa Kerja / Job Fair	Kab/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	150.000.000	
4.	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, DAN Lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Prov. Maluku Utara	Persentase RPTKA yang disahkan	100%	10.000.000	4. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, DAN Lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Prov. Maluku Utara	Persentase RPTKA yang disahkan	100%	200.000.000	
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA dan Notifikasi yang tidak mengandung perubahan jabatan, Jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Kab/Kota	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	50 Orang	10.000.000	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA dan Notifikasi yang tidak mengandung perubahan jabatan, Jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Kab/Kota	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	100 Orang	50.000.000	
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perpajakan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 Lap	150.000.000	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perpajakan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 Lap	150.000.000	
	Program Hubungan Industrial	Prov. Maluku Utara	Persentase Kasus sengketa Pekerja Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	250.000.000	Program Hubungan Industrial	Prov. Maluku Utara	Persentase Kasus sengketa Pekerja Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	1.200.000.000	
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Prov. Maluku Utara	Besaran Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tersedia	100%	20.000.000	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Prov. Maluku Utara	Besaran Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tersedia	100%	200.000.000	

RENJA 2024

	Pengesahan Peraturan 1) Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	10.000.000	Pengesahan Peraturan 1) Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	50.000.000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja 2) Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan	10.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja 2) Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja	Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Lap	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja	Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Lap	100.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 2. Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	180.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan 2. Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	800.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 1) Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Propinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	30.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 1) Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Propinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	150.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 2) Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	30.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 2) Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	150.000.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan koofederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi	Kab/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi	-	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan koofederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi	Kab/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi	100.000.000	
	Pelaksanaan Operasional 4) Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	-	Pelaksanaan operasional 4) lembaga kerjasama Tripartit daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	LKS Tripartit	200.000.000	

RENJA 2024

	5) Pembinaan Pengupahan skala Provinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	120.000.000	5) Pembinaan Pengupahan skala Provinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	200.000.000	
	3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Prov. Maluku Utara	Cakupan penetapan UMP,UMSP,UMK, dan UMSK	1 Dok	50.000.000	3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Prov. Maluku Utara	Cakupan penetapan UMP,UMSP,UMK, dan UMSK	1 Dok	200.000.000	
	1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Prov. Maluku Utara	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat keputusan	50.000.000	1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Prov. Maluku Utara	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat keputusan	200.000.000	
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Prov. Maluku Utara	Cakupan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100%	580.000.000	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Prov. Maluku Utara	Cakupan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100%	3.650.000.000	
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Prov. Maluku Utara	Besaran Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan	100%	580.000.000	1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Prov. Maluku Utara	Besaran Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan	100%	3.650.000.000	
	1) Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	300 Perusahaan	350.000.000	1) Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	300 Perusahaan	1.500.000.000	
	2) Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Prov. Maluku Utara	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	30.000.000	2) Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Prov. Maluku Utara	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	150.000.000	
	3) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	300 Perusahaan	200.000.000	3) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	300 Perusahaan	2.000.000.000	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100%	80.000.000	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100%	750.000.000	
	1. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Cakupan pelaksanaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	100%	80.000.000	1. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Cakupan pelaksanaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	100%	750.000.000	
	1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	80.000.000	1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	350.000.000	
	2) Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Prov. Maluku Utara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	-	2) Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab/Kota	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kasus	200.000.000	

RENJA 2024

	Penatausahaan 3) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	-	Penatausahaan 3) Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	200.000.000	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Besaran Terbangunnya lokasi transmigrasi dalam kawasan transmigrasi	100%	750.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	Besaran Terbangunnya lokasi transmigrasi dalam kawasan transmigrasi	100%	4.700.000.000	
1.	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Terfasilitasinya persebaran TPS (Transmigran Penduduk Setempat) dalam 1 daerah Provinsi	100%	750.000.000	1. Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Terfasilitasinya persebaran TPS (Transmigran Penduduk Setempat) dalam 1 daerah Provinsi	100%	4.700.000.000	
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 laporan	0	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dok	200.000.000	
	2) Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	400.000.000	2) Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	3.000.000.000	
	3) Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	30 KK	0	3) Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	30 KK	150.000.000	
	4) Penyuluhan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	30 KK	100.000.000	4) Penyuluhan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	30 KK	350.000.000	
	5) Pelatihan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Calon Transmigran /Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	150.000.000	5) Pelatihan Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Calon Transmigran /Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	500.000.000	
	6) Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten / Kota	Kab/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	30 Orang	-	6) Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten / Kota	Kab/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	30 Orang	300.000.000	

RENJA 2024

	7) Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	100.000.000	7) Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Kab/Kota	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	200.000.000	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka penanganan daerah tertinggal	100%	1.630.000.000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka penanganan daerah tertinggal	100%	5.300.000.000	
	Pengembangan Satuan 1. Permukiman pada Tahap Pemantapan	Prov. Maluku Utara	Cakupan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	100%	1.630.000.000	Pengembangan Satuan 1. Permukiman pada Tahap Pemantapan	Prov. Maluku Utara	Cakupan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	100%	5.300.000.000	
	1) Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kab/Kota	Jumlah SDM yang berkembang di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	100.000.000	1) Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kab/Kota	Jumlah SDM yang berkembang di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	300.000.000	
	2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kab/Kota	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	1.530.000.000	2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kab/Kota	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	5.000.000.000	

Pada table review diatas terlihat bahwa Pagu anggaran indikatif T.A 2024 yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar **Rp. 15.508.166.957,- (lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)**. Namun dari hasil analisa kebutuhan anggaran yang objektif, untuk dapat mencapai target Indikator Renstra 2020-2024 di tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membutuhkan anggaran paling sedikit sebesar **Rp. 47.735.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**. Analisa kebutuhan anggaran ini sudah termasuk Gaji ASN. Estimasi besaran anggaran ini didasarkan pada adanya usulan masyarakat di Kabupaten/Kota dan Lembaga-Lembaga Mitra. Selain itu besaran anggaran ini juga didasarkan pada hasil evaluasi dinas terhadap kondisi objektif di lapangan serta kebutuhan dinas dalam upaya mencapai target RPJMD Daerah.

Beberapa kebutuhan yang mendesak yang sangat mempengaruhi Kinerja aparatur Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara adalah Pembangunan Kantor Dinas yang berlokasi di Desa Durian Kecamatan Oba. Anggaran yang dibutuhkan untuk merampung kegiatan pembangunan tersebut yang penganggarnya terputus di Tahun 2023 ini adalah kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.000. (Delapan Milyar Rupiah). Sementara ini kondisi bangunan masih berupa beberapa Tiang Pancang. Untuk beberapa Tambahan Sub Kegiatan lain sebagaimana terlihat pada table diatas adalah sangat diperlukan untuk dilaksanakan untuk dapat mempermudah atau menunjang pencapaian indikator Kinerja utama yang ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara berpatokan pada :

- a. Visi dan Misi Gubernur dan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 202-2024 serta Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024.
- b. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional dan Kementrian terkait

- c. Hasil Musrembang Tingkat Provinsi berdasarkan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara
- d. Proposal Permintaan/permohonan masyarakat dan Lembaga/instansi teknis terkait lainnya yang diserahkan langsung ke Dinas.
- e. Aspirasi masyarakat yang diperoleh pada saat melakukan kunjungan kedinasan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
- f. Hasil pengamatan dan Penelitian di lapangan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

Sebagaimana proses didalam pengumpulan berbagai usulan masyarakat dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta stake holder terkait lainnya, selanjutnya data-data tersebut akan direkapitulasi sebagaimana Tabel. T-C 32. dibawah ini.

RENJA 2024

Tabel, T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara

No	Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Pengusul	MASALAH	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidore, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	Masih minimnya pengalaman dan keterampilan para pencari kerja	1 Paket	Diterima
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Tidore, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Bappeda Kab/Kota	Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan	1 Paket	Diterima
3	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Desa Sido Mulyo-Kao Barat , Provinsi Maluku Utara	Jumlah satuan permukiman yang ditingkatkan infrastruktur, sosial, ekonomi dan kelembagaan	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya bibit dan pupuk untuk masyarakat di daerah transmigrasi	1 Paket	Diterima
4	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Desa Toboulamo-Kec. Kao Barat, Provinsi Maluku Utara	Jumlah satuan permukiman yang ditingkatkan infrastruktur, sosial, ekonomi dan kelembagaan	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya bibit dan pupuk untuk masyarakat di daerah transmigrasi	1 Paket	Diterima
5	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Desa Trans Hero Ino Kec. Tobelo Barat, Provinsi Maluku Utara	Jumlah satuan permukiman yang ditingkatkan infrastruktur, sosial, ekonomi dan kelembagaan	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya bibit dan pupuk untuk masyarakat di daerah transmigrasi	1 Paket	Diterima

RENJA 2024

6	Perluasan Kesempatan Kerja	Desa Talaga Paca Kec. Tobelo Selatan, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Bappeda Kab/Kota	Belum merata keramba air tawar untuk masyarakat	1 Paket	Diterima
7	Perluasan Kesempatan Kerja	Desa Bale Kec. Galela Selatan, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Bappeda Kab/Kota	Belum merata keramba air tawar untuk masyarakat	1 Paket	Diterima
8	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	Keahlian pencari kerja belum maksimal sehingga dibutuhkan pelatihan : 1. Pelatihan Security (10 orang) 2. Pelatihan operator Exavator (15 orang)	2 paket	Diterima
9	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya sarana pelatihan salon yang memadai di masyarakat	4 Paket	Diterima
10	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kecamatan Kao , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pengadaan Bantuan Sarana Home Industri	2 Paket	Diterima
11	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Tobelo , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pengadaan Bantuan Sarana Home Industri	2 Paket	Diterima

RENJA 2024

12	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Galela , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pengadaan Bantuan Sarana Home Industri	4 Paket	Diterima
13	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Tobelo , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja- Pengadaan Sarana Perbengkelan	2 Paket	Diterima
14	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Kao , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja- <u>Pengadaan Sarana Perbengkelan</u>	3 paket	Diterima
15	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Desa Soasio Kec. Galela, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya peralatan perbengkelan yang memadai- Pengadaan Sarana Perbengkelan	1 Paket	Diterima
16	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Tobelo , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pengadaan Sarana Pertukangan	1 Paket	Diterima
17	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. kao , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - <u>Pengadaan Sarana Pertukangan</u>	2 Paket	Diterima
18	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Malifut , Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana Pelatihan Kerja untuk Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - <u>Pengadaan Sarana Pertukangan</u>	2 Paket	Diterima

RENJA 2024

19	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Desa Tomahalu Kec. Tobelo Selatan, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	Masih Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan Kursus Musik (Keyboard PSR SX900 4 BH)- 5 Unit	5 Unit	Diterima dengan pertimbangan
20	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	banyak potensi SDM namun belum ada kegiatan pemberdayaan tept sasaran, 1 kelompok	1 Paket	Diterima
21	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Desa Kusubibi dan Desa Jojame, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Bappeda Kab/Kota	kurangnya fasilitas dalam kawasan transmigrasi	1 Paket	Diterima
22	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bappeda Kab/Kota	kurangnya sarana pelatihan bagi calon tenaga kerja (excavator)	1 paket	Diterima dengan pertimbangan
23	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	kurangnya ketrampilan para pencari kerja yang dibutuhkan oleh industri (PELATIHAN OPRATOR LOADER (OL))	1 paket	Diterima
24	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	kurangnya ketrampilan para pencari kerja yang dibutuhkan oleh industri (OPRATOR FORKLIF (OF)	1 paket	Diterima
25	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	kurangnya ketrampilan para pencari kerja yang dibutuhkan oleh industri (OPRATOR EXCAVATOR (OE))	1 paket	Diterima
26	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	kurangnya ketrampilan para pencari kerja yang dibutuhkan oleh industri OPRATOR OFERHEAT CRANE (OHC)	1 paket	Diterima
27	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	kurangnya ketrampilan para pencari kerja yang dibutuhkan oleh industri (TEKHNISI AUDIO VIDEO)	1 paket	Diterima
28	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Labuha, Provinsi Maluku Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bappeda Kab/Kota	kurangnya ketrampilan para pencari kerja yang dibutuhkan oleh industri (PEMROGRAMAN EMBEDDED SYSTEM)	1 paket	Diterima

Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat yang diperoleh sebagaimana diurai pada table T-C.32 diatas adalah sangat berkesesuaian dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di Wilayah Propinsi Maluku Utara saat ini, yaitu peningkatan kompetensi pekerja dan calon pekerja, pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kewirausahaan, serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur pada Kawasan Transmigrasi, serta pengembangan usaha bagi masyarakat Transmigran. Namun demikian berbagai usulan yang masuk tersebut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara akan diseleksi dan diverifikasi mengingat kesediaan anggaran cukup terbatas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Memasuki periode keempat RPJPN, pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu sector utama yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari salah satu sasaran pokok pembangunan nasional adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan SDM dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan merupakan permasalahan krusial yang tengah dihadapi saat ini, walaupun secara umum perkembangan ketenagakerjaan nasional telah mengalami kemajuan yang ditandai oleh semakin berkurangnya tingkat pengangguran dan semakin tingginya tingkat penduduk yang bekerja.

Titik permasalahan ketenagakerjaan nasional adalah masih adanya 7 Juta jiwa (5,34%) yang masih masuk kategori pengangguran terbuka. Di samping itu, meskipun tingkat penduduk yang bekerja relatif semakin banyak, namun ternyata mayoritas masih tamatan SMP ke bawah. Dari total penduduk yang bekerja, sebanyak 58,78 persen di antaranya merupakan pekerja yang masih berpendidikan rendah (SD dan SMP). Sementara 29,04 persen merupakan tenaga kerja dengan tamatan pendidikan menengah (SMA dan SMK). Hanya sebesar 12,18 persen pekerja yang telah tamat pendidikan tinggi (diploma dan Universitas). Kondisi tersebut merupakan fakta yang perlu disikapi secara serius, mengingat mayoritas pekerja di Indonesia masih tergolong Pendidikan rendah yang identik dengan keterbatasan keahlian (low skilled).

Disisi lain pembangunan ketenagakerjaan nasional diperhadapkan dengan persoalan lain seperti, tingkat kesejahteraan buruh yang masih rendah termasuk kepesertaan buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang

masih rendah; Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja yang layak; Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja; Kewirausahaan yang rendah; serta Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Untuk merealisasikan Arah kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan nasional, Kementrian Tenaga Kerja memfokuskan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan pada sasaran strategis yaitu meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara sebagai instansi teknis di daerah yang menangani masalah ketenagakerjaan dalam merancang program kegiatan di Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan arah dan kebijakan nasional dan Kementrian Tenaga Kerja sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Dalam Renstra Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi disebutkan permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah masalah penanggulangan kemiskinan, dimana walaupun angka kemiskinan terus menurun namun penurunan angka kemiskinan tersebut masih belum memenuhi harapan pemerintah dan cenderung laju penurunnya melambat. Demikian juga dengan kesenjangan wilayah yang belum memperlihatkan penurunan yang signifikan bahkan terkesan stagnan dan melambat. Di sektor yang lain seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, perluasan akses terhadap sarana dan prasarana pendukung di pedesaan/daerah-daerah terpencil, serta konektivitas antar wilayah juga belum sepenuhnya dapat mempengaruhi secara signifikan penurunan kesenjangan wilayah/di pedesaan.

Selain permasalahan yang ada, terlihat pula potensi yang memberikan harapan terhadap keberhasilan program kerja pada 5 (lima) tahun mendatang yaitu angka kemiskinan terus menurun walaupun presentasinya masih sangat kecil, koefisien gini rasio di pedesaan menunjukan arah yang membaik, dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan mengalami fluktuasi namun cenderung membaik selama periode 2010-2016.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada maka ditetapkan tujuan pembangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Terwujudnya Desa Mandiri
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan Perkotaan
3. Tumbuh dan Berkembangnya investasi perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang, dan 5.000 Desa berkembang menjadi desa mandiri.
2. Revitalisasi 60 kawasan perdesaan, sehingga tercipta integrasi Desa-Kota
3. Meningkatkan Investasi PRUKADES
4. Revitalisasi kawasan transmigrasi
5. Mengentaskan 25 Kabupaten dari 62 Kabupaten Daerah Tertinggal
6. Meningkatkan kapasitas SDM Perdesaan.

Untuk memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menetapkan arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu ;

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar desa
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan
7. Peningkatan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

Berkaitan dengan peran sector ketransmigrasian maka lokus pembangunan ketransmigrasian berada pada 52 (lima puluh dua) Kawasan prioritas nasional yang diproyeksikan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari 52 (lima puluh dua) kawasan tersebut 12 (dua belas) kawasan ditargetkan menjadi kawasan berkembang, 33 (tiga puluh tiga) kawasan menjadi kawasan mandiri serta 7 (tujuh) kawasan menjadi kawasan berdaya saing. Selain itu program pembangunan ketransmigrasian juga terfokus pada 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Transmigrasi prioritas bidang termasuk didalamnya 136 (seratus tiga puluh enam) satuan permukiman bina. Hal ini sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum terlihat bahwa sasaran dan arah kebijakan nasional dan Kementrian yang dipaparkan diatas telah sinergis dengan sasaran kerja dan sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan program pembangunannya di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khususnya pada misi 2 yaitu Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang dituangkan di dalamnya sudah sesuai dengan kebijakan nasional, dimana kebijakan nasional di tahun 2024 dalam pembangunan tenaga kerja yaitu berorientasi pada percepatan pengurangan angka pengangguran, Pengembangan kawasan Strategis, Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk dikawasan transmigrasi, Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Termasuk Kawasan Transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota, Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir Desa-Kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minopolitan, pariwisata dan transmigrasi dan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara

Pada hakekatnya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal berwawasan lingkungan bersih, serta berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan, pengembangan ekonomi lokal dan daerah serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Di bidang ketransmigrasian diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan pada 2 Kawasan Prioritas Nasional yaitu Kawasan Pulau Mangoli (Kep. Sula) dan Kawasan Pulau Morotai (Morotai) sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dan 6 (Enam) Kawasan Transmigrasi prioritas bidang yaitu Kawasan Payahe (Tikep), Toliwang (Halut), Patlean (Haltim), Sagea Waleh (Halteng), serta Kawasan Nusliku dan Pulau Bacan (Halsel), juga termasuk didalamnya beberapa satuan permukiman Bina. Dengan demikian, pembangunan di bidang ketransmigrasian tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pada aspek sumberdaya manusia yang pada gilirannya harus mampu memberikan kontribusi secara nyata dan terukur dalam pembangunan perdesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Sedangkan Arah Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal di prioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal dengan memfokuskan pada pembangunan sector public, pembinaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemanfaatan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya untuk pengentasan daerah tertinggal serta memperkuat dan mempercepat

kemandirian kawasan permukiman transmigrasi. Selain itu kebijakan program pembangunan daerah tertinggal dimaksudkan pula untuk meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan.

Mendasari uraian diatas maka tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja local dan membaiknya pendapatan perkapita, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis
3. Mewujudkan kawasan pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (*Clean and Clear*) dan 3L (Layak Huni, Layak berkembang dan Layak Lingkungan) serta mengembangkan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi menjadi permukiman transmigrasi yang mandiri dan kawasan yang berkembang sebagai embrio pusat pertumbuhan baru.
4. Menurunnya indeks kemiskinan pada Kawasan Transmigrasi dan daerah tertinggal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya local

b. Sasaran

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal dilakukan untuk mencapai sasaran antara lain :

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja local, meningkatkan kesempatan kerja yang layak, meningkatkan kewirausahaan masyarakat, serta Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja lokal

2. Peningkatan kesejahteraan buruh/pekerja, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB), dan Pengawasan norma kerja K3.
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pada 2 kawasan prioritas nasional dan 6 kawasan prioritas bidang serta Kawasan transmigrasi Bina menjadi permukiman transmigrasi yang mandiri dan kawasan yang berkembang sebagai embrio pusat pertumbuhan baru;
4. Pengentasan 2 wilayah/kabupaten tertinggal dan menurunkan indeks kemiskinan di daerah tertinggal.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pembangunan daerah tertinggal tahun 2024 disusun dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Selain pencapaian visi dan misi Gubernur, penyusunan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara tahun 2024 didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara khususnya pada pengurangan angka pengangguran terbuka, perluasan kesempatan dan penempatan tenaga kerja yang layak, serta partisipasi angkatan kerja. Selain itu factor yang menjadi pertimbangan lainnya yaitu peningkatan hubungan industrial yang harmonis serta Pengawasan Norma K3 dalam hal ini adalah meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB), dimana dengan semakin bertambahnya perusahaan akan memiliki potensi terjadinya perselisihan antara buruh-perusahaan juga akan semakin besar sehingga perlu langkah-langkah antisipasi untuk bisa melindungi hak-hak para buruh bila terjadi perselisihan. Pengawasan Norma K3 menjadi factor yang sangat perlu diperhatikan mengingat konsekwensi beroperasinya perusahaan-perusahaan industry pertambangan akan berkaitan erat dengan tingkat keselamatan dan Kesehatan para pekerja/buruh dalam bekerja.
- b. Pertimbangan terhadap Pembangunan Kewilayahan menjadi bahan dalam penyusunan program dan kegiatan selanjutnya. Hal yang mendasari dalam segi ini

adalah percepatan revitalisasi 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional khususnya pada 2 kawasan prioritas nasional di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Pulau Mangoli dan Kawasan Morotai) dan 88 Kawasan Transmigrasi Prioritas Bidang dimana 6 kawasan prioritas bidang tersebut berada di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Payahe, Toliwang, Patlean, Sagea Waleh, serta Kawasan Nusliku dan Pulau Bacan). Pembangunan kawasan Satuan Permukiman Bina juga mendapat perhatian dalam pembangunan ketransmigrasian di Provinsi Maluku Utara. Percepatan revitalisasi Kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah ini dengan menghadirkan Kawasan permukiman transmigrasi yang mandiri dan maju sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru.

- c. Bagian dari percepatan pembangunan kewilayahan adalah dengan memprioritaskan perencanaan program dan kegiatan pada sector Pembangunan Daerah Tertinggal dimana di bidang ini difokuskan pada program pendayagunaan potensi ekonomi daerah (potensi unggulan local), dan menciptakan peluang investasi ke dalam wilayah tertinggal, terisolir/terpencil. Hal lain yang menjadi focus program percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai program pendukung yang bersinergis untuk percepatan revitalisasi Kawasan transmigrasi.

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan diatas bahwa alokasi Pagu indikatif untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dialokasikan sebesar Rp. 15.508.166.957,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Akan tetapi atas berbagai pertimbangan yang objektif maka Pagu anggaran tersebut telah dinaikan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara menjadi sebesar Rp. 38.638.166.957 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Peningkatan Anggaran tersebut didapat melalui usulan anggaran pokok-pokok pikiran (Aspirasi) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara serta adanya proyeksi percepatan Pembangunan Ibu Kota Propinsi (Kota Sofifi) dan Percepatan Pengembangan Ekonomi pada Wilayah-Wilayah yang memiliki tingkat Kemiskinan yang berkategori tinggi.

Menindaklanjuti berbagai pertimbangan yang telah diuraikan diatas, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara telah menyusun 9 (Sembilan) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan serta 106 Sub Kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 8 (delapan) Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan;
- 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan;
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas 4 (Empat) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan;
- 4) Program Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dan 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan;
- 5) Program Hubungan Industrial, terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan;
- 6) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan;
- 7) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan;
- 8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan; dan
- 9) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Untuk Program dan kegiatan yang berhubungan dengan sector ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas akan difokuskan kepada wilayah-wilayah (Kabupaten-Kota) yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kewirausahaan yang rendah, dan wilayah industry pertambangan dan perhotelan.

Untuk Program dan kegiatan pada sector ketransmigrasian focus pembangunan dan pengembangannya akan diarahkan pada 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional/kementrian yaitu Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai. Selain itu program pembangunan dan pengembangan sector ketransmigrasian juga akan diarahkan pada 6 Kawasan transmigrasi Prioritas Bidang yaitu Kawasan Transmigrasi Payahe, Toliwang, Patlean, Sagea Waleh, Nusliku, dan Pulau Bacan.

Selain itu program pembangunan Ketransmigrasian juga akan diarahkan pada Kawasan Satuan Permukiman Bina, sehingga dapat menjadi simpul bagi kemajuan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih tergolong miskin dan tertinggal dalam pembangunannya.

RENJA 2024

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Maluku Utara

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
							Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					38.638.166.957,00			43.703.808.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.778.166.957,00			34.353.808.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					33.778.166.957,00			34.353.808.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.358.166.957,00			25.153.808.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000,00			575.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	175.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.553.808.000,00	10.573.808.000,00			11.073.808.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1330 Orang/ Bulan	10.523.808.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 Orang/ Bulan	10.523.808.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	75.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	75.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000,00	20.000.000,00			355.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	75.000.000,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000,00	35.000.000,00			840.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	30.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	50.000.000,00
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	50.000.000,00
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	6 Orang	30.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	150.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	150.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah				360.358.957,00	360.358.957,00			2.065.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.358.957,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	50.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	1.500.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0,00			8.300.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.000.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.000.000,00	249.000.000,00			1.100.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	189.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	850.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.000.000,00	50.000.000,00			845.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	565.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	145.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	75.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				30.000.000,00	30.000.000,00			375.000.000,00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				30.000.000,00	30.000.000,00			375.000.000,00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	50.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	3 Orang	150.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	10 Orang	175.000.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.850.000.000,00	2.890.000.000,00			2.050.000.000,00
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi				1.800.000.000,00	1.820.000.000,00			1.725.000.000,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	1.780.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100 Orang	1.500.000.000,00
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Lembaga	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga	75.000.000,00
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	150.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				0	20.000.000,00			75.000.000,00
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 LPK	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	1 LPK	75.000.000,00
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				1.020.000.000,00	1.020.000.000,00			100.000.000,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Perusahaan	1.020.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	2 Perusahaan	100.000.000,00
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				30.000.000,00	30.000.000,00			150.000.000,00
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	150.000.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				18.550.000.000,00	18.620.000.000,00			3.350.000.000,00
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				18.490.000.000,00	18.530.000.000,00			2.650.000.000,00
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	100.000.000,00
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 Orang	150.000.000,00
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	150.000.000,00
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10 Orang	150.000.000,00
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	18.460.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	2.000.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	100.000.000,00
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	20.000.000,00			250.000.000,00
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	100.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Lembaga	20.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	150.000.000,00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				60.000.000,00	60.000.000,00			275.000.000,00
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	200 Orang	75.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	150.000.000,00
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				0	0,00			100.000.000,00
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	100.000.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perusahaan	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	5 Perusahaan	0,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	0,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	20 Orang	0,00
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0,00
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0	10.000.000,00			75.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	50 Orang	75.000.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				210.000.000,00	250.000.000,00			1.275.000.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota				10.000.000,00	20.000.000,00			275.000.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perusahaan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	100.000.000,00
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perusahaan	10.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan	75.000.000,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	100.000.000,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000,00	180.000.000,00			675.000.000,00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perkara	30.000.000,00	Kurang Bayar DBH SDA	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	150.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perkara	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	200.000.000,00
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	75.000.000,00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Lembaga	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	75.000.000,00
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perusahaan	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	175.000.000,00
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)				50.000.000,00	50.000.000,00			325.000.000,00
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Surat Keputusan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	150.000.000,00
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Surat Keputusan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	75.000.000,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	300 Orang	100.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				780.000.000,00	780.000.000,00			2.150.000.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				780.000.000,00	780.000.000,00			2.150.000.000,00
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Perusahaan	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	300 Perusahaan	500.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kasus	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	150.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Perusahaan	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	300 Perusahaan	1.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.860.000.000,00	4.960.000.000,00			9.350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				4.860.000.000,00	4.960.000.000,00			9.350.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				80.000.000,00	80.000.000,00			350.000.000,00
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				80.000.000,00	80.000.000,00			350.000.000,00
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	350.000.000,00
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kawasan Transmigrasi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	0,00
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Hektar	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 Hektar	0,00
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	0,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				650.000.000,00	750.000.000,00			3.800.000.000,00
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				650.000.000,00	750.000.000,00			3.800.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	0,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	2.500.000.000,00
Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kepala Keluarga	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	30 Kepala Keluarga	0,00
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kepala Keluarga	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	0,00
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kepala Keluarga	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	30 Kepala Keluarga	350.000.000,00
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	500.000.000,00
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kepala Keluarga	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	30 Kepala Keluarga	0,00
Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	1 Lokasi	0,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	30 Orang	300.000.000,00
Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 KK	0,00
Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	30 KK	0,00
Penampungan Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	30 KK	0,00
Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	1 KK	0,00
Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	30 KK	0,00
Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	30 KK	0,00
Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 KK	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	30 KK	0,00
Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	1 Paket	0,00
Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	150.000.000,00

RENJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				4.130.000.000,00	4.130.000.000,00			5.200.000.000,00
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan				4.130.000.000,00	4.130.000.000,00			5.200.000.000,00
Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kepala Keluarga	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga	200.000.000,00
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Satuan Permukiman	3.730.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	5.000.000.000,00
				38.918.166.957,00				43.703.808.000,00

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA-SKPD TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA

No	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
				Lokasi	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi					38.918.166.957		
A	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	Dinas	100%	11.388.166.957	DAU	Disnakert rans
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas	100%	100.000.000		Disnakert rans
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	2 Dok	10.000.000		sda
		2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	1 Dok	10.000.000		sda
		3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	1 Dok	10.000.000		sda
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas	1 Dok	10.000.000		sda
		5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas	1 Dok	10.000.000		sda
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	2 Dok	10.000.000		sda
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	1 Dok	40.000.000		sda
		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Dinas	100%	10.573.808.000	DAU	Disnakert rans
		1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	1330 Orang	10.523.808.000		Disnakert rans
		2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	1 Dok	-		Disnakert rans
		3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas	1 Dok	10.000.000		Disnakert rans

		4)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas	1 Dok	10.000.000		Disnakertrans
		5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	1 Lap	10.000.000		Disnakertrans
		6)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas	1 Dok	10.000.000		Disnakertrans
		7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	1 Lap	10.000.000		Disnakertrans
		8)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	1 Dok	-		Disnakertrans
		1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Dinas	100%	20.000.000	DAU	Disnakertrans
		1)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas	1 Dok	-		Disnakertrans
		2)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas	1 Dok	-		Disnakertrans
		4)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	1 Lap	10.000.000		
		5)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	1 Lap	10.000.000		Disnakertrans
		6)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas	1 Lap	-		
		1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Dinas	100%	35.000.000	DAU	
		3)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas	1 Dok	-		sda
		5)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas	1 Dok	-		sda
		6)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	5 orang	15.000.000		sda
		7)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas	5 Orang	-		sda

			8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	35 Orang	-	sda	
			9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	5 orang	20.000.000	sda	
		1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	1	360.358.957	DAU	Disnakert rans
		1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas	1 Paket	5.000.000		Disnakert rans
		2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas	1 Paket	10.000.000		sda
		3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tagga yang disediakan	Dinas	1 Paket	-		sda
		4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	Dinas	1 Paket	5.000.000		sda
		5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dinas	1 Paket	10.358.957		sda
		6)	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Dinas	20 Dok	10.000.000		sda
		7)	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Dinas	1 Paket	20.000.000		sda
		8)	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	1 Lap	-		sda
		9)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	10 Lap	300.000.000		sda
		10)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	1 Dok	-		sda
		1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pengadaan BMD yang dilaksanakan	Dinas	100%	-	DAU	Disnkertr ans
		1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Dinas	1 Unit	-		Disnakert rans
		2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas	5 Unit	-		sda
		5)	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas	1 Paket	-		sda
		1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	100%	249.000.000	DAU	Disnakert rans
		1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas	1 Lap	10.000.000		Disnakert rans
		2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas	1 Lap	50.000.000		Disnakert rans
		3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas	1 Lap	-		Disnakert rans

		4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas	2 Lap	189.000.000		Disnakert rans
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	100%	50.000.000	DAU	Disnakert rans
		1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas	30 Unit	25.000.000		Disnakert rans
		2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas	4 Unit	25.000.000		sda
		3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas	10 Unit	-		sda
		4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas	15 Unit	-		sda
		5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Dinas	3 Unit	-		sda
	II	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	Prov. Maluku Utara	100%	30.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		2.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Prov. Maluku	100%	30.000.000	DAU	Prov. Maluku
		1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah	Prov. Maluku Utara	10 Dok	-		Prov. Maluku Utara
		2) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Prov. Maluku Utara	20 Orang	-		Prov. Maluku Utara
		3) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Prov. Maluku Utara	20 Orang	30.000.000		Prov. Maluku Utara
	III	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	Prov. Maluku Utara	1,85%	2.890.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		3.1 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Cakupan pelatihan Tenaga Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Prov. Maluku Utara	100%	1.820.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Prov. Maluku Utara	300 Orang	1.780.000.000		Prov. Maluku Utara
		2) Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Prov. Maluku Utara	10 Lembaga	20.000.000		Prov. Maluku Utara
		3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Prov. Maluku Utara	3 Unit	20.000.000		Prov. Maluku Utara

		3.2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Prov. Maluku Utara	100%	20.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Prov. Maluku Utara	10 LPK	20.000.000		Prov. Maluku Utara
		3.3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Cakupan pelayanan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	Prov. Maluku Utara	100%	1.020.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		Pelaksanaan Konsultasi 1) Produktivitas pada Perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Prov. Maluku Utara	6 Perusahaan	1.020.000.000		Prov. Maluku Utara
		3.4. Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Provinsi	Besaran Dokumen Pengukuran Produktivitas Daerah	Prov. Maluku Utara	100%	30.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Prov. Maluku Utara	1 Dok	30.000.000		Prov. Maluku Utara
	IV.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	Prov. Maluku Utara	10,0%	18.620.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	Prov. Maluku Utara	100%	18.530.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Prov. Maluku Utara	1 Orang	10.000.000		Prov. Maluku Utara
		2) Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Prov. Maluku Utara	50 Orang	20.000.000		Prov. Maluku Utara
		3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Prov. Maluku Utara	20 Orang	20.000.000		Prov. Maluku Utara
		4) Pembinaan Operasional pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Prov. Maluku Utara	25 Orang	20.000.000		Prov. Maluku Utara
		5) Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Prov. Maluku Utara	300 Orang	18.460.000.000		Prov. Maluku Utara
		2. Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Maluku Utara	100%	20.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		2) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Prov. Maluku Utara	5 Lembaga	20.000.000		Prov. Maluku Utara
		3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	Prov. Maluku Utara	100%	60.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		2) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Prov. Maluku Utara	200 Orang	10.000.000		Prov. Maluku Utara

		3) Pameran Bursa Kerja / Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Prov. Maluku Utara	200 Orang	50.000.000		Prov. Maluku Utara
		4. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, DAN Lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Persentase RPTKA yang disahkan	Prov. Maluku Utara	100%	10.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA dan Notifikasi yang tidak mengandung perubahan jabatan, Jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Propinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Prov. Maluku Utara	50 Orang'	10.000.000		Prov. Maluku Utara
	V. Program Hubungan Industrial		Persentase Kasus sengketa Pekerja Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Prov. Maluku Utara	100%	250.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Besaran Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tersedia	Prov. Maluku Utara		20.000.000		
		1) Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Prov. Maluku Utara	30 Perusahaan	10.000.000		
		2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Prov. Maluku Utara	30 Perusahaan	10.000.000		
		3) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Prov. Maluku Utara	1 Lap	-		
		2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	100%	180.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Propinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Prov. Maluku Utara	50 Perkara	30.000.000		Prov. Maluku Utara
		2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Prov. Maluku Utara	50 Perkara	30.000.000		Prov. Maluku Utara
		3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan koofederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Prov. Maluku Utara	5 Asosiasi	-		Prov. Maluku Utara
		5) Pembinaan Pengupahan skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Prov. Maluku Utara	50 Perusahaan	120.000.000		Prov. Maluku Utara

		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Cakupan penetapan UMP,UMSP,UMK, dan UMSK	Prov. Maluku Utara	1 Dok	50.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Prov. Maluku Utara	1 Surat keputusan	50.000.000		Prov. Maluku Utara
	VI.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	Prov. Maluku Utara	100%	780.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan	Prov. Maluku Utara	100%	780.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Prov. Maluku Utara	300 Perusahaan	350.000.000		Prov. Maluku Utara
		2) Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Prov. Maluku Utara	5 Kasus	30.000.000		Prov. Maluku Utara
		3) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Prov. Maluku Utara	300 Perusahaan	400.000.000		Prov. Maluku Utara
	VII	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Prov. Maluku Utara	100%	80.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Cakupan pelaksanaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Prov. Maluku Utara	100%	80.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain		2 Dokumen	80.000.000		Prov. Maluku Utara
	VIII	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Besaran Terbangunnya lokasi transmigrasi dalam kawasan transmigrasi	Prov. Maluku Utara	100%	750.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1. Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Terfasilitasinya persebaran TPS (Transmigran Penduduk Setempat) dalam 1 daerah Provinsi	Prov. Maluku Utara	100%	750.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, 1) Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)		1 Dokumen	400.000.000		Prov. Maluku Utara
		2) Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		30 KK	100.000.000		Prov. Maluku Utara
		3) Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		30 Orang	150.000.000		Prov. Maluku Utara
		4) Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi		30 Orang	-		Prov. Maluku Utara

RENJA 2024

		5) Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		2 Lokasi	100.000.000		Prov. Maluku Utara
	IX	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka penanganan daerah tertinggal	Kab/Kota	100%	4.130.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Cakupan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Prov. Maluku Utara	100%	4.130.000.000	DAU	Prov. Maluku Utara
		1) Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah SDM yang berkembang di kawasan transmigrasi		Kepala Keluarga	400.000.000		Prov. Maluku Utara
		2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		2 Satuan Permukiman	3.730.000.000		Prov. Maluku Utara

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) mengandung program yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Upaya percepatan laju pertumbuhan pembangunan Propinsi Maluku Utara khususnya bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di era otonomi daerah akan sangat tergantung kepada partisipasi aktif Dinas serta Instansi terkait dan dunia usaha serta masyarakat luas. Hasil-hasil pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan warga transmigran serta keluarganya.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan sumber daya yang dimiliki dinas selama 1 (satu) tahun, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, September 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara



DR. Marwan Polisiri, SKM., MPH
Pembina Utama Muda. IV/c
Nip.19801115 200501 1 012

Lampiran :

DAFTAR JUMLAH PERUSAHAAN DALAM WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN SECARA ONLINE PROVINSI MALUKU UTARA								
NO.	KAB/KOTA	JUMLAH PERUSAHAAN (TAHUN)						KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	Maret 2023	Prediksi 2024	
1	Kabupaten Halmahera Barat	15	15	15	58	64	98	
2	Kabupaten Halmahera Timur	7	11	14	103	116	186	
3	Kabupaten Halmahera Tengah	4	6	23	77	96	143	
4	Kabupaten Halmahera Selatan	19	29	36	198	230	280	
5	Kabupaten Halmahera Utara	53	69	76	180	212	250	
6	Kabupaten Kepulauan Sula	60	62	62	106	116	154	
7	Kabupaten Pulau Taliabu	12	14	14	65	69	108	
8	Kabupaten Pulau Morotai	16	17	21	68	85	121	
9	Kota Ternate	477	524	539	1036	1153	1586	
10	Kota Tidore Kepulauan	40	43	45	92	100	201	
TOTAL		703	790	845	1983	2241	3127	

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara



DR. Marwan Polisiri, SKM., MPH

Pembina Utama Muda. IV/c

Nip. 19801115 200501 1 012

Figur. Indeks Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2022

Kawasan	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022	
		IPK Trans	Status	IPK Trans	Status	IPK Trans	Status
Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional							
Pulau Morotai	Morotai	40,38	Berkembang	49,79	Berkembang	38,44	Berkembang
Mangole	Kepulauan Sula	7,97	Berkembang	35,34	Berkembang	41,38	Berkembang
Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian							
Payahe-Maidi-Kosa	Kota Tidore Kepulauan	49,89	Berkembang	56,93	Mandiri	55,95	Mandiri
Dorosagu Patlean	Halmahera Timur	42,3	Berkembang	34,92	Berkembang	27,97	Berkembang
Sagea Waleh	Halmahera Tengah	30,31	Berkembang	18,6	Berkembang	13,07	Berkembang
Nusliku	Halmahera Selatan	19,33	Berkembang	37,06	Berkembang	36,63	Berkembang
Pulau Bacan	Halmahera Selatan	19,65	Berkembang	22.20	Berkembang	22,75	Berkembang
Toliwang	Halmahera Utara	11,33	Berkembang	16,03	Berkembang	41,82	Berkembang

Sumber : Laporan Kinerja Dirjen P2KT Tahun 2020, 2021, dan 2022 Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara

DR. Marwan Polisiri, SKM., MPH

Pembina Utama Muda. IV/c

Nip.19801115 200501 1 012

REALISASI KEUANGAN PER TANGGAL 30 November 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN	(%)	
2.07.3.32.0.00.01	BELANJA DAERAH	103.775.104.532	69.475.507.868	66,95	34.299.596.664
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.574.214.722	65.214.252.288	67,53	31.359.962.434
2.07	Tenaga Kerja	96.574.214.722	65.214.252.288	67,53	31.359.962.434
2.07 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.335.766.633	11.582.364.428	75,53	3.753.402.205
2.07 . 01 . 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	866.516.390	724.973.320	83,67	141.543.070
2.07 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.950.000	215.304.000	93,63	14.646.000
2.07 . 01 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	169.701.000	167.189.000	98,52	2.512.000
2.07 . 01 . 1.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.931.720	-	-	38.931.720
2.07 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33.945.500	-	-	33.945.500
2.07 . 01 . 1.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	60.690.320	31.001.820	51,08	29.688.500
2.07 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156.439.850	154.620.500	98,84	1.819.350
2.07 . 01 . 1.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.858.000	156.858.000	88,69	20.000.000
2.07 . 01 . 1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.351.485.560	8.111.808.585	78,36	2.239.676.975
2.07 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.789.440.000	7.754.181.585	79,21	2.035.258.415
2.07 . 01 . 1.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.834.200	160.697.000	98,09	3.137.200
2.07 . 01 . 1.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	161.034.600	-	-	161.034.600
2.07 . 01 . 1.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.333.410	68.220.000	90,56	7.113.410
2.07 . 01 . 1.02 . 06	Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	28.259.550	-	-	28.259.550
2.07 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	133.583.800	128.710.000	96,35	4.873.800
2.07 . 01 . 1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	9.894.350	-	-	9.894.350
2.07 . 01 . 1.03 . 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.894.350	-	-	9.894.350
2.07 . 01 . 1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	60.960.000	-	-	60.960.000
2.07 . 01 . 1.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000	-	-	11.000.000
2.07 . 01 . 1.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.960.000	-	-	49.960.000
2.07 . 01 . 1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.601.861.333	1.510.734.080	94,31	91.127.253
2.07 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	-	20.000.000
2.07 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.172.500	50.972.500	83,33	10.200.000
2.07 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.400.000	51.200.000	99,61	200.000
2.07 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.400.000	50.000.000	69,06	22.400.000
2.07 . 01 . 1.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	186.095.000	160.930.000	86,48	25.165.000
2.07 . 01 . 1.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.040.000	60.000.000	88,18	8.040.000
2.07 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.142.753.833	1.137.631.580	99,55	5.122.253
2.07 . 01 . 1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.458.066.000	512.075.587	35,12	945.990.413
2.07 . 01 . 1.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.398.066.000	512.075.587	36,63	885.990.413
2.07 . 01 . 1.07 . 02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	-	-	60.000.000
2.07 . 01 . 1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	986.983.000	722.772.856	73,23	264.210.144
2.07 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.432.000	40.000.000	47,38	44.432.000
2.07 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.308.000	70.312.172	64,32	38.995.828
2.07 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.243.000	612.460.684	77,21	180.782.316

RENJA 2024

2.07 . 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	472.943.350	119.885.600	25,35	353.057.750
2.07 . 02 . 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	472.943.350	119.885.600	25,35	353.057.750
2.07 . 02 . 1.01 . 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	472.943.350	119.885.600	25,35	353.057.750
2.07 . 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	39.859.361.100	30.666.668.280	76,94	9.192.692.820
2.07 . 03 . 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	38.849.730.300	30.065.714.280	77,39	8.784.016.020
2.07 . 03 . 1.01 . 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster	38.049.730.300	29.265.914.280	76,91	8.783.816.020
2.07 . 03 . 1.01 . 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	800.000.000	799.800.000	99,98	200.000
2.07 . 03 . 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	234.611.300	230.437.000	98,22	4.174.300
2.07 . 03 . 1.02 . 01	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	234.611.300	230.437.000	98,22	4.174.300
2.07 . 03 . 1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	573.361.750	170.846.750	29,80	402.515.000
2.07 . 03 . 1.03 . 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	573.361.750	170.846.750	29,80	402.515.000
2.07 . 03 . 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	201.657.750	199.670.250	99,01	1.987.500
2.07 . 03 . 1.04 . 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	201.657.750	199.670.250	99,01	1.987.500
2.07 . 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	35.905.620.539	18.088.938.630	149	17.816.681.909
2.07 . 04 . 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.069.838.816	17.284.068.130	49,28	17.785.770.686
2.07 . 04 . 1.01 . 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	60.326.000			60.326.000
2.07 . 04 . 1.01 . 02	Pelayanan Antar Kerja	728.677.000	425.653.000	58,41	303.024.000
2.07 . 04 . 1.01 . 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	52.903.000		-	52.903.000
2.07 . 04 . 1.01 . 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	20.342.000		-	20.342.000
2.07 . 04 . 1.01 . 05	Perluasan Kesempatan Kerja	34.207.590.816	16.858.415.130	49,28	17.349.175.686
2.07 . 04 . 1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.927.000	-	-	26.927.000
2.07 . 04 . 1.02 . 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	26.927.000		-	26.927.000
2.07 . 04 . 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	808.854.723	804.870.500	99,51	3.984.223
2.07 . 04 . 1.03 . 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	99.183.473	97.753.000	98,56	1.430.473
2.07 . 04 . 1.03 . 03	Job Fair/Bursa Kerja	709.671.250	707.117.500	99,64	2.553.750
2.07 . 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	500.396.250	488.584.800	97,64	11.811.450
2.07 . 05 . 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	500.396.250	488.584.800	97,64	11.811.450
2.07 . 05 . 1.02 . 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	153.492.850	148.801.800	96,94	4.691.050
2.07 . 05 . 1.02 . 05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	346.903.400	339.783.000	97,95	7.120.400
2.07 . 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	4.500.126.850	4.267.810.550	94,84	232.316.300
2.07 . 06 . 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	4.500.126.850	4.267.810.550	94,84	232.316.300
2.07 . 06 . 1.01 . 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.416.529.250	1.383.937.500	97,70	32.591.750
2.07 . 06 . 1.01 . 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	3.083.597.600	2.883.873.050	93,52	199.724.550
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.200.889.810	4.261.255.580	59,18	2.939.634.230
3.32	Transmigrasi	7.200.889.810	4.261.255.580	-	2.939.634.230
3.32 . 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	945.849.500	239.878.000	25,36	705.971.500
3.32 . 02 . 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	945.849.500	239.878.000	25,36	705.971.500
3.32 . 02 . 1.01 . 01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	945.849.500	239.878.000	25,36	705.971.500

RENJA 2024

3.32 . 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.505.047.040	1.215.853.540	48,54	1.289.193.500
3.32 . 03 . 1.01	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)</i>	2.505.047.040	1.215.853.540	48,54	1.289.193.500
3.32 . 03 . 1.01 . 05	Penyuluhan Transmigrasi	395.976.310	388.521.060	98,12	7.455.250
3.32 . 03 . 1.01 . 06	Pelatihan Transmigrasi	2.109.070.730	827.332.480	39,23	1.281.738.250
3.32 . 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.749.993.270	2.805.524.040	74,81	944.469.230
3.32 . 04 . 1.01	<i>Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan</i>	3.749.993.270	2.805.524.040	74,81	944.469.230
3.32 . 04 . 1.01 . 01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1.120.310.380	753.831.180	67,29	366.479.200
3.32 . 04 . 1.01 . 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	2.629.682.890	2.051.692.860	78,02	577.990.030
	J U M L A H	103.775.104.532	69.475.507.868	66,95	34.299.596.664

Sofifi, 30 November 2023



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara

DR. Marwan Polisiri, SKM, MPH
NIP. 19201115 200501 1 012